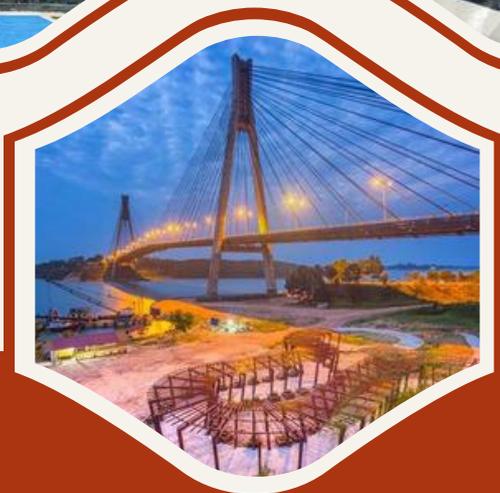
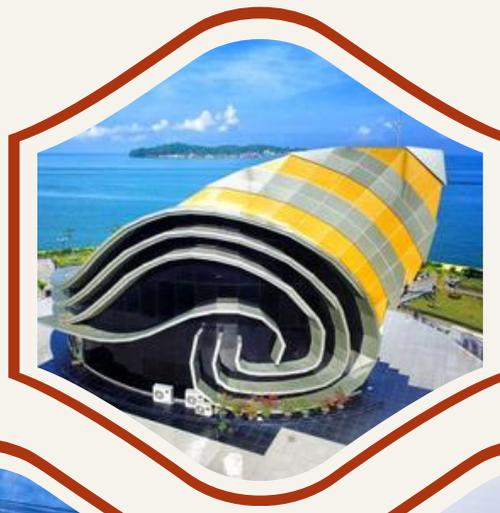


BUKU

PROFIL PEMBANGUNAN KEPRI TAHUN 2021



BUKU PROFIL PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

13

SEJARAH PROVINSI KEP. RIAU

48

PROFIL EKONOMI

69

PROFIL SUMBERDAYA
KEMARITIMAN

78

PROFIL SOSIAL DEMOGRAFI

Perkembangan Kesehatan Dimasa Pandemi 67

Dimensi Kemiskinan 80

Tingkat Ketenagakerjaan 84

Perkembangan Pendidikan 87

111

PROYEK STRATEGIS DAERAH

122

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI KEP. RIAU
2021



H. ANSAR AHMAD S.E., M.M.

KATA SAMBUTAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2020-2025

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada Kesempatan yang baik ini, marilah kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus melakukan upaya pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang kita laksanakan selama ini, sehingga telah memberikan hal yang baik dan manfaat yang maksimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Buku Profil Pembangunan Provinsi Kepri Tahun 2021 ini merupakan Pembaharuan dari Buku Profil Pembangunan sebelumnya tentang gambaran umum keadaan daerah meliputi: Administrasi Wilayah, Letak Geografis, Kependudukan, Perekonomian Daerah, Visi, Misi Program-program Pembangunan, pelaksanaan sektor-sektor pembangunan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) daerah, kami berpandangan bahwa substansi materi profil daerah tersebut perlu di Informasikan secara luas kepada masyarakat, kalangan dunia usaha, investor dan kalangan birokrat didalam maupun diluar daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui Penyebarluasan Informasi substansi materi profil pembangunan tersebut, kita harapkan adanya umpan balik atau feedback yang positif dapat berupa kerjasama pembangunan antar daerah, kerjasama investasi dan terobosan akses informasi pengembangan produk unggulan daerah. Karena itu kami menyambut baik tersusunnya Buku Profil Pembangunan Provinsi Kepri Tahun 2021 dengan harapan kehadiran Buku Profil Pembangunan ini mampu meraih sasaran seperti yang telah disampaikan diatas.

Sepenuhnya menyadari bawa informasi yang disusun dan disajikan dalam Buku Profil Pembangunan Provinsi Kepri ini sangat terbatas dan relatif berupa gambaran umum. Hal yang lebih rinci dan bersifat teknis dapat dikembangkan lebih lanjut masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Demikian hal yang dapat disampaikan, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan Terimakasih

**Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh**



PROFIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. Ansar Ahmad S.E., M.M.

Ansar Ahmad (lahir 10 April 1964) adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 pada tahun 2020 dan Bupati Bintan selama 2 periode yakni 2005–2010 dan 2010–2015.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 3 Kijang, Bintan Timur (1977)
- SMP Negeri 4 Tanjungpinang (1981)
- SMA Negeri 2 Tanjungpinang (1985)
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1989)
- S2 Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2003)

RIWAYAT JABATAN

- Kasubbag Program Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tk. II Kabupaten Kepulauan Riau (1994–1997)
- Pj. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (1997–2000)
- Wakil Bupati Kepulauan Riau (2001–2003)
- Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Riau (2003–2004)
- Bupati Bintan (2005–2010, 2010–2015)
- Anggota DPR RI (2019–2020)
- Gubernur Kepulauan Riau (2021–sekarang)

HJ. MARLIN AGUSTINA

KATA SAMBUTAN

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU PERIODE 2020-2025



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara saudari pembaca Buku Profil
Propinsi Kepri Tahun 2021 yang saya
banggakan.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan
puji syukur yang tidak terhingga kepada
Allah SWT. Tahun 2021 banyak sekali
tantangan yang harus kita hadapi bersama,
yang tidak pernah terbayangkan
sebelumnya. Bahkan, kita mungkin tidak
pernah membayangkan bahwa kita semua
dapat mengatasinya.

Buku Profil Propinsi Kepri Tahun 2021 ini
menjadi catatan penting pembangunan
Kepri selama masa pandemi COVID-19. Di
tengah badai ujian begitu besar tersebut
Propinsi Kepri tetap mampu melanjutkan
pembangunan untuk mencapai visi dan
misinya. Selamat kepada tim penyusun yang
telah bekerja keras menyusun buku ini.
Semoga bermanfaat bagi mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan.

Anak Nelayan Naik Perahu
Memasang jarring di bawah bagan
Mari bersama bahu membahu
Membangun Kepri Propinsi Kebanggaan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



PROFIL WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Hj. Marlin Agustina

Marlin Agustina (lahir 15 Agustus 1971) adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau sejak 25 Februari 2021. Pada Pilkada 2020 Kepulauan Riau, Marlin Agustina digandeng oleh Ansar Ahmad sebagai Wakil Gubernur



RIWAYAT JABATAN

- Wakil Gubernur Provinsi Kep.Riau 2020 - 2025

RIWAYAT ORGANISASI

- Ketua TP-PKK Kota Batam 2016 - 2021
- Ketua PIKORI Kota Batam 2019 - sekarang
- Ketua DEKRANASDA Kota Batam 2016 - 2021
- Ketua Bunda PAUD Kota Batam 2016 - 2021
- Ketua P2TP2A Kota Batam 2016 - 2021
- Ketua GOW Kota Batam 2016 - 2021
- Ketua KERABAT BARKAD 2019 - 2023
- Ketua LASQI Kota Batam 2019 - 2023
- Ketua TPQ Kota Batam 2019 - 2023

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 STIE TRIBUANA





DRS. ADI PRIHANTARA ,M.M.

KATA SAMBUTAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT.

Propinsi Kepulauan Riau merupakan propinsi yang sangat strategis di Indonesia dengan jalur pelayaran tersibuk di dunia di sepanjang Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, dan berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kepulauan Riau juga memiliki potensi sumber daya mineral, energi, kelautan dan pariwisata yang relatif besar. Keberadaannya di zona perdagangan bebas Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, Kepulauan Riau telah mengalami industrialisasi yang cepat yang ditunjukkan oleh pembangunan yang menggeliat.

Pemerintah Propinsi Kepri telah berusaha secara maksimal melewati dampak pandemic COVID-19 dalam berbagai sektor pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau telah berupaya mewujudkan pembangunan dengan

beberapa penekanan pembangunan seperti percepatan penanganan Covid-19, percepatan vaksinasi Covid-19, pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta percepatan proyek-proyek strategis di daerah. Pemerintah Provinsi juga telah mengambil beberapa kebijakan untuk pemulihan masyarakat di Kepri

Selanjutnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa buku Profil Pembangunan Propinsi Kepri ini sangat berguna dalam upaya menyampaikan informasi pembangunan kepada Masyarakat. Semoga dengan informasi yang diperoleh masyarakat akan dapat meningkatkan kontribusi dan partisipasi semua komponen masyarakat di Kepri.

Pulau Dompok pusat pemerintahan Pemandangannya Indah Pelipurlara
Kuatkan niat fokuskan pelayanan
Wujudkan masyarakat lebih sejahtera

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh**

PROFIL SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Adi Prihantara M.M.

Lahir di Pacitan, 09 Mei 1965

Setelah kurang lebih 5 tahun menjadi Sekda Bintan, Adi Prihantara kembali diberikan tugas yang lebih luas untuk mengemban amanah sebagai pejabat eselon Ib, menjadi Sekda Provinsi Kepri



RIWAYAT JABATAN

- Kasubbag Umum Pemerintahan (1997-1999)
- Kasubbag Agraria (1999-2002)
- Camat Gunung Kijang (2002-2003)
- Camat Teluk Sebung (2003-2004)
- Camat Bintan Utara (2004-2004) 8 Bulan
- Kabag Perlengkapan (2004-2005)
- Kabid Aset (2005-2006)
- Kabid Pembiayaan (2006-2007)
- Sekretaris BPKKD (2007-2009)
- Sekretaris DPPKAD (2009-2012)
- Kepala Dinas Pertanian (2012-2014)
- Kepala BAPPEDA (2014-2014) 5 Bulan
- Kepala DPPKAD (2014-2016)
- Asisten Administrasi Umum (2017)
- Sekretaris Daerah (Oktober 2017 - Sekarang)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD NEGERI PUNUNG IV (1977)
- SMP NEGERI PUNUNG (1981)
- SMA NEGERI 271 PACITAN (1984)
- S1 UNIVERSITAS 11 MARET (FISIPOL) (1989)
- S2 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (2002)

ANDRI RIZAL S.E., MM

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan Rahmat taufik dan Hidayah-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mendukung pembangunan daerah kita.

Buku Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 menghimpun data dan informasi pada berbagai kegiatan sektoral sehingga diharapkan mampu menggambarkan keadaan pembangunan sekaligus meningkatkan kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disadari sepenuhnya karena tanpa tersedianya data-data statistik yang lengkap dan terpercaya, baik pemerintah, kalangan dunia usaha dan masyarakat umum tidak mampu untuk membuat perencanaan yang baik dan terarah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Buku Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau merupakan publikasi komprehensif yang dapat memberikan gambaran singkat mengenai keadaan, potensi serta keberhasilan pembangunan yang ada di Kepulauan Riau.

Selain itu, buku profil ini merupakan publikasi yang memberikan informasi mengenai data umum, sosial, sumber daya alam, infrastruktur, industri, perdagangan, lembaga keuangan, ekonomi dan keuangan, hukum dan keamanan, serta data insidensial.

Semoga Buku Profil Pembangunan Provinsi Kepri Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan semua lapisan yang membutuhkan informasi yang tersedia. Sekian dan Terimakasih.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh**

PROFIL KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Andri Rizal S.E.,M.M.

Lahir di Jakarta, 24 Agustus 1974

Jabatan Kepala Badan Perencanaan
Penelitian Pembangan Provinsi Kepulauan
Riau / Pembina Utama Madya / IV.C



RIWAYAT JABATAN

- Plt. Kasubbag Pembukuan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
- Kasubbag Belanja Tidak Langsung Bio Keuangan Sekretariat
- Kepala Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- Kasubbag Keuangan Sekretariat Badan Promos dan Investasi Daerah
- Kasubbid Pembinaan Pengelolaan APBD dan Anggaran BUMD Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- Plt. Sekretaris Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- Sekretaris Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- Plh. Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- Plt. Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD NEGERI 008 KAMPUNG MELAYU PEKANBARU TAHUN LULUS 1987
- SMP NEGERI 4 PEKANBARU TAHUN LULUS 1980
- SMA NEGER I PEKANBARU TAHUN LULUS 1993
- AKUNTASI STIE YKPN YOGYAKARTA TAHUN LULUS 1998
- MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA TAHUN LULUS 2001



JUMAGA NADEAK, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

*KETUA DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU*

**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



Propinsi Kepulauan Riau, Bunda Tanah Melayu, Negeri Segantang Lada dengan sejuta pesona dan potensi. Keindahan alam, ragam seni budaya, serta keramahan masyarakatnya membuat Kepri semakin dikenal di Indonesia maupun mancanegara. Kini, Kepri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat prospektif di Indonesia. Eksistensi Kepri demikian tentunya merupakan peluang besar bagi semua komponen yang ada berkolaborasi dan bekerjasama untuk memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya di wilayah propinsi Kepri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam rangka upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tujuan pembangunan berkelanjutan, DPRD Kepri telah menjalankan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah. Ini dimaksud agar Kepri bisa segera memulihkan ekonomi dan melanjutkan pembangunan setelah diterpa pandemic COVID-19. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kepri bersama masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepri memberi apresiasi kepada pemerintah daerah atas segala capaian pembangunan yang telah dilakukan. Bukanlah hal yang mudah untuk bangkit dari dampak ekonomi pandemic covid-19 tersebut, karena seluruh propinsi dan negara di dunia juga harus menghadapinya. Namun dengan kerjasama yang baik, kami yakin visi misi pembangunan Kepri dapat tercapai dengan baik.

Terakhir, Ketua DPRD Propinsi Kepri menyambut baik atas disusunnya buku Profil Pembangunan Propinsi Kepri Tahun 2021 ini. Semoga dengan adanya buku ini akan menjadi referensi penting bagi semua pihak yang memerlukan informasi kinerja dan capaian program serta proyek strategis propinsi Kepri.

Anak melayu berbaju songket
Lakunya elok sepanjang masa
Tantangan pembangunan tidaklah sedikit
Dengan Bersama tentulah bisa

Sekian, Terimakasih



PROFIL KETUA DPRD KEPULAUAN RIAU

Jumaga Nadeak S.H.,M.H

Jumaga Nadeak lahir di Tanjung Bunga,
11 Oktober 1957

Merupakan Ketua DPRD Provinsi
Kepulauan Riau Periode 2019-sekarang

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SMA Negeri 1 Panguruan Samosir – Sumatra Utara (1974)
- S1 Universitas Islam Riau Fakultas Hukum (1983)

RIWAYAT JABATAN

- Anggota DPRD Riau (1999 – 2004)
- Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau (2004 - 2009)
- Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau (2009 - 2014)
- Ketua DPRD Kepulauan Riau (2014 – 2019)
- Ketua DPRD Kepulauan Riau (2019 – 2024)



RIZKI FAISAL SE.,MM

KATA SAMBUTAN

WAKIL KETUA I DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mari kita ucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena kepada kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan, insya Allah, kesehatan untuk melanjutkan tugas bersama kita membangun negeri ini menuju hari esok yang lebih baik.

DPRD Propinsi Kepri dalam hal ini Wakil Ketua I memberi apresiasi atas disusunnya buku ini, untuk digunakan secara luas bagi masyarakat Kepri. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam pembangunan di Kepri, mengingat pandemic Covid-19 belumlah usai.

Namun pembangunan harus tetap bisa berjalan sesuai perencanaan. Bersama pemerintah daerah propinsi Kepri sebagai mitra strategis kami, serta dari seluruh masyarakat Kepri, InshaAllah Kepri dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri.

Apa guna membeli payung
Tidak dipakai sewaktu hujan
Adat istiadat selalu dijunjung
Agar pembangunan tetap bermartabat

Sekian Terimakasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Assalammu'alaikum
Warahmatullahi
Wabarakatuh**

Selamat atas selesainya
penyusunan buku Profil
Pembangunan Provinsi Kepri
Tahun 2021

Bukanlah mudah memancing
ikan
Ikan didapat dibawa pulang
Berbagai program telah dilakukan
Untuk membangun Kepri
cemerlang

Sekian Terimakasih

**Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh**



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami memberi penghargaan yang tinggi atas selesainya penyusunan Buku Profil Pembangunan Propinsi Kepri Tahun 2021. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama untuk mengetahui program dan capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Ape guna indahnya pemandangan
Ketika sampah tidak tertata
Propinsi Kepri negeri junjungan
Masyarakatnya sejahtera impian kita

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SEJARAH

Provinsi Kepulauan Riau

(disingkat Kepri] adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan; Negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201.72 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan. Nama Asal usul nama Kepulauan Riau berasal dari nama Riau. Riau diduga berasal kata "riuh" yang berarti ramai. Hal ini dikarenakan daerah Kepulauan Riau dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian.

Lalu nama ini berkembang dengan digunakannya nama Riau pada nama Kesultanan Lingga. Pada masa kolonial, kata Riau dituliskan "Riouw", sesuai dengan ejaan Bahasa Belanda#Diftong. Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Riau (Kepulauan Riau saat ini) disatukan dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra. Dahulunya, hal ini dilakukan karena gerakan Ganyang Malaysia sehingga mempermudah hubungan dari wilayah kepulauan ke daratan Sumatra.

Namun, seiring berjalannya waktu, nama Riau digunakan oleh wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra, sementara Kepulauan Riau memekarkan diri. Kata kepulauan ditambahkan didepan kata Riau karna wilayah yang sebagian besar lautan atau berbentuk kepulauan. Asal usul nama Riau juga menuai polemik di antara budayawan Riau dan Kepulauan Riau. Kedua kubu ini menilai bahwa nama Riau berasal dari provinsinya masing-masing dengan versi sejarah yang berbeda.



Sejarah Singkat

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Negeri Pantun



Sejarah sebelum pembentukan provinsi

Sejarah di kepulauan riau dimulai dengan ditemukannya prasasti pasir panjang di karimun yang terdapat semboyan pemujaan melalui tapak kaki Buddha. Hal ini diduga berhubungan dengan kerajaan melayu di sumatra Buddha diperkirakan masuk melalui pedagang dari Tiongkok dan India.

Masa islam di Kepulauan Riau berkembang dengan berdirinya Kesultanan Riau-Lingga. Kesultanan ini berasaskan Melau Islam dan Islma sendiri dikenal setelah dibawa oleh pedagang dari Gurajat, India, dan Arab.

Masa Korolial sangat berpengaruh dalam sejarah Kepulauan Riau. Julukan Hawaii Van Lingga yang diberikan kepada pulau Penuba, penggunaan uang tersendiri bagi Kepulauan Riau, dan terbentuknya Karesidenan Riouw menjadi bukti pengaruh kuat para kolonial di Kepulauan Riau.

Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatra sehingga membentuk provinsi Riu. Dahulunya, kepulauan Riu juga menggunakan mata uang tersendiri bernama Uang Kepulauan Riau(KR).

Namun secara perlahan, penggunaan mata uang ini dihentikan dan digantikan dengan mata uang rupiah.

Setelah lama bergabung dengan Riau. Kepulauan Riau akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk badan perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR). Perjuangan BP3KR akhirnya membuahkan hasil dengan pemekaran provisi kepulauan riau dai riau pada tangga 24 September 2002.

Sejarah setelah pembentukan provinsi

Kepulauan riau merukan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi riau. Provinsi kepulauan riau terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2002 merukapan provinsi ke 32 di indonesia yang mencakup kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kupulauan Anambas dan Kepulauan Lingga.

ARTI LAMBANG



Lambang Daerah Kepulauan Riau terdiri dari 6 bagian dengan rician sebagai berikut:

- **Bintang** berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
- **Mata Rantai berwarna hitam** berjumlah 32 yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat provinsi kepulauan riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya provinsi kepulauan riau sebagai provinsi yang ke- 32 di negara republik indonesia
- **Perahu berwarna kuning** sebagai simbol alat transportasi masyarakat kepulauan riau dengan layar berwarna putih
- **Padi berwarna kuning** berjumlah 24 butir dan kapas berwarna hijau dan pith berjumlah 9 kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat provinsi kepulauan riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disahkan undang-undang terbentuknya provinsi kepulauan riau 24 september 2002, sebilah kering berluk 7 berwarna kuning emas berhulu kepala burung serindit berwarna hitam, diatas tepak sirih bewana merag lekuk 5, didalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut:

1. **Sebilah keris** berluk 7 berwarna kuning emas berhulu kepala burung serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran,
2. **Tepak sirih** berwarna merah melambangkan persahabatan,
3. **Perahu berwarna kuning** sebagai simbol alat transportasi masyarakat kepulauan riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, malambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di provinsi kepulauan riau,
4. **Gelombang berlapis 7** sebagai simbol bulan juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1juli2004;

Tulisan "PROVINSI KEPULAUAN RIAU" berwarna putih diatas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah PITA berwarna kuning bertuliskan "BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH" berwarna hitam adalah motto daerah yang mengandung semangat dan tekad serta azam masyarakat

VISI

VISI DAN MISI

"TERWUJUDNYA
KEPULAUAN RIAU SEBAGAI
BUNDA TANAH MELAYU
YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAK MULIA,
RAMAH LINGKUNGAN DAN
UNGGUL DI BIDANG
MARITIM"



H. Ansar Ahmad S.E., M.M.
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau



Hj. Marlin Agustina
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

MISI

- 1.MENGEMBANGKAN PERIKEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DEMOKRATIS, BERKEADILAN, TERTIB, RUKUN DAN AMAN DI BAWAH PAYUNG BUDAYA MELAYU.
- 2.MENINGKATKAN DAYA SING EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA.
- 3.MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA SEHINGGA MEMILIKI DAYA SING TINGGI.
- 4.MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN, KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENANGANAN KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS).
- 5.MENERUSKAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, PARIWISATA, PERTANIAN UNTUK Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan
- 6.MENINGKATKAN IKLIM EKONOMI KONDUSIF BAGI KEGIATAN PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
- 7.MENERUSKAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DENGAN MEMANFAATKAN BAHAN BAKU LOKAL.
- 8.MENINGKATKAN DAYA DUKUNG, KUALITAS DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.
- 9.MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, APARATUR BIROKRASI YANG PROFESIONAL,DISIPLIN DENGAN ETOS KERJA TINGGI SERTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.



H. Ansar Ahmad S.E., M.M.
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau



Hj. Marlin Agustina
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau



Tanjungpinang.

Atau **tanjung pinang** (disingkat **Tg. Pinang**) adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di pulau bintang dan beberapa pulau kecil seperti pulau dampak dan pulau penyengat, dengan koordianat 005'LU dan 104027'BT. Kota Tanjungpinang dahulunya adalah pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga, Sebelum dimerdekakan menjadi kota otonom. Tanjungpinang adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Riau

(Sekarang Kabupaten Bintan). Kota ini juga awalnya adalah ibukota Provinsi Kepulauan Riau (meliputi Riau daratan dan kepulauan) sebelum kemudian Dipindahkan ke kota Pekanbaru.

Kota ini memiliki cukup banyak daerah pariwisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kularang lebih 2 mil dari pelabuhan sri bintang pura, Patai Trikora dengan Pasir Putihnya terletak kurang lebih 65 km dari kota, dan Pantai Buatan yaitu Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota(waterfront city).

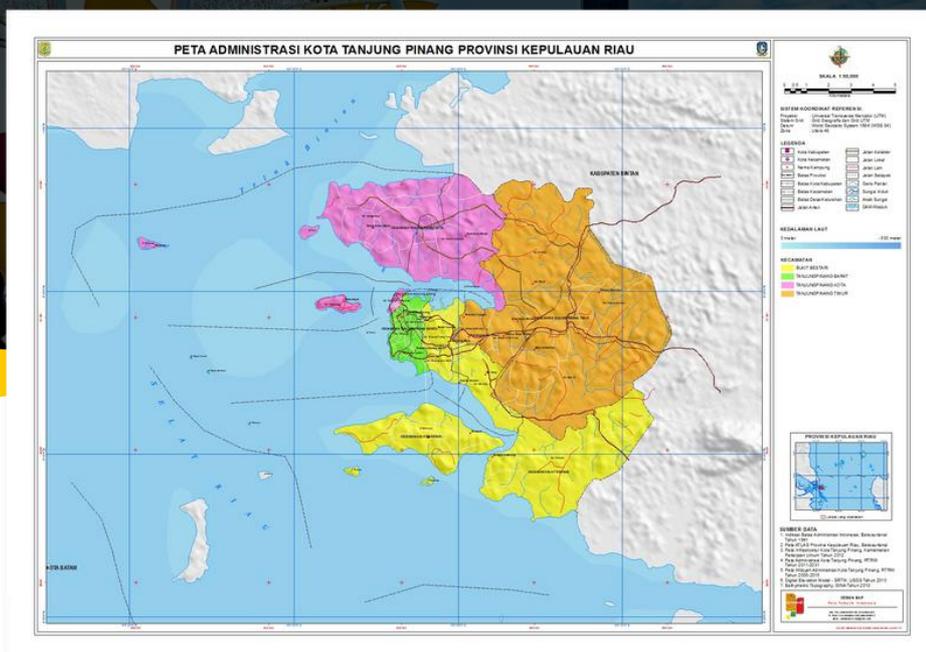
Pelabuhan Laut Tanjungpinang di Sri Bintang Pura memiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat (speedboat) untuk akses domestik ke pulau Batam dan pulau-pulau lain seperti Kepulauan Karimun dan Kundur, serta kota-kota lain di Riau. Pelabuhan ini juga merupakan akses internasional ke Malaysia dan Singapura.

Sejarah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Salalatus Salti, Tanjungpinang merupakan bagian dari Kerajaan Malaka. Setelah jatuhnya Malaka ketangan Portugal. Sultan Mamud Syah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintah Kesultanan Malaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Johor. Sebelum diambil alih oleh Belanda setelah mereka menundakan perlawanan Raja Haji Fisabilillah 1784 di Pulau Penyengat. Pada masa Hindia Belanda, Tanjungpinang merupakan pusat pemerintahan Karesidenan Riouw. Kemudian di awal kemerdekaan Indonesia, menjadi ibu kota Provinsi Riau. Pada tahun 1957, Tanjungpinang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Namun dua tahun kemudian ibu kota provinsi itu dipindahkan ke Pekanbaru. Setelah itu statusnya menjadi kota Administrasi hingga tahun 2000. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2001. Pada tanggal 21 juni 2001 statusnya ditingkatkan menjadi Kota Tanjungpinang. Pusat pemerintah yang semula berada dipusat Kota Tanjungpinang, kemudian diindahjan ke Senggarang (bagian utara kota).

Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan serta mengurangi kepadatan

penduduk yang selama ini berpusat di kota Lama (bagian barat kota). Pada tahun 2002, Kota Tanjungpinang kembali menjadi ibu Kota provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Riau.



INFORMASI GEOGRAFI

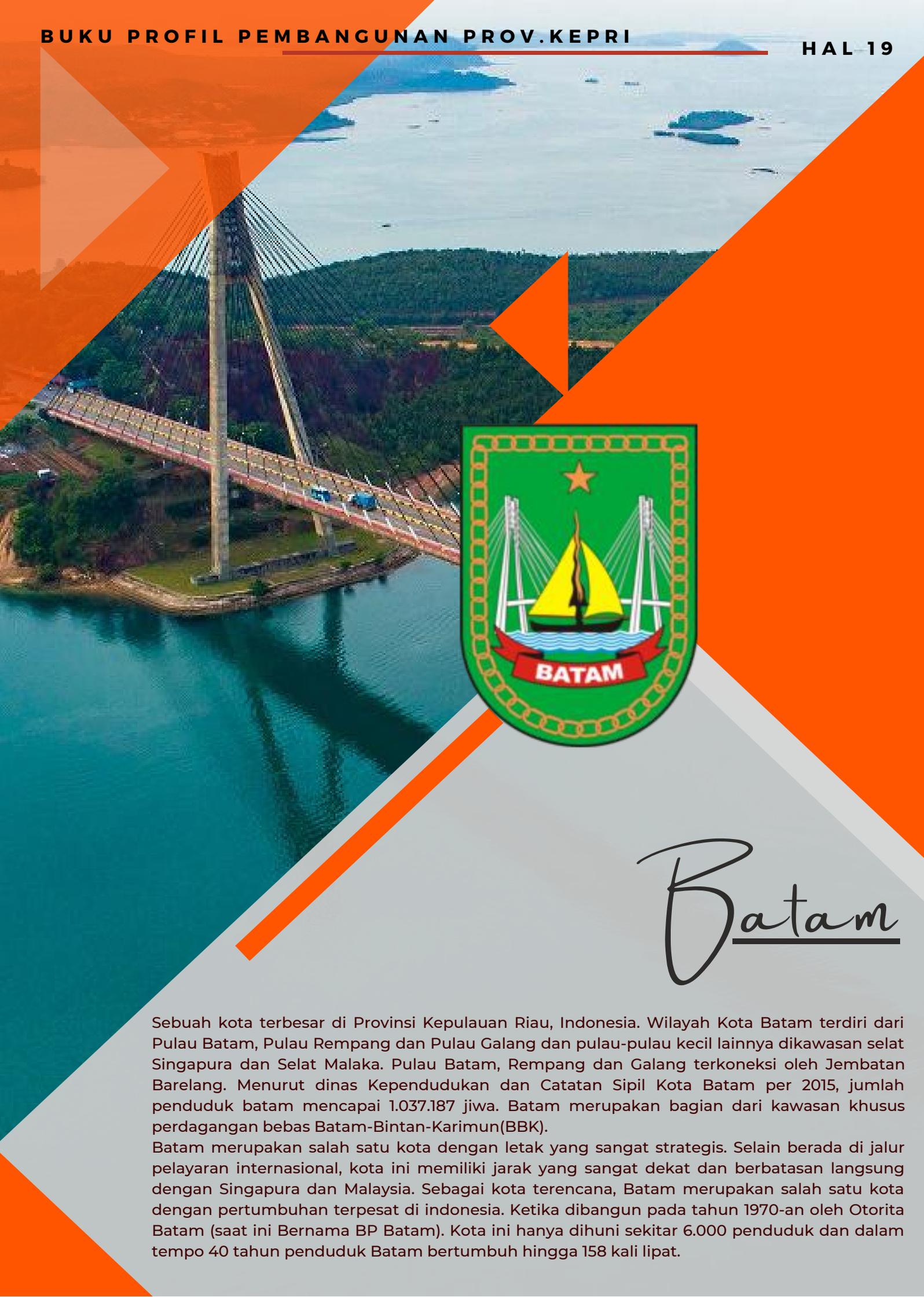
Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rwa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan. Sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur.

Iklm

Kota Tanjungpinang mupun Pulau Bintan keseluruhan beriklim tropis dengan temperatur 23C – 34C. Tekanan udaranya berkisar antar 1.010,2 mbs dan 1.012,7 mbs.

Musim

Secara resmi memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Tidak ada perbedaan yang mencolok didaerah ini. Hujan dapat turun sepanjang tahun. Namun setiap akhir sampai dengan awal tahun terjadi "angin utara" yang sangat berbahaya dengan gelombang yang sangat kuat.



Batam

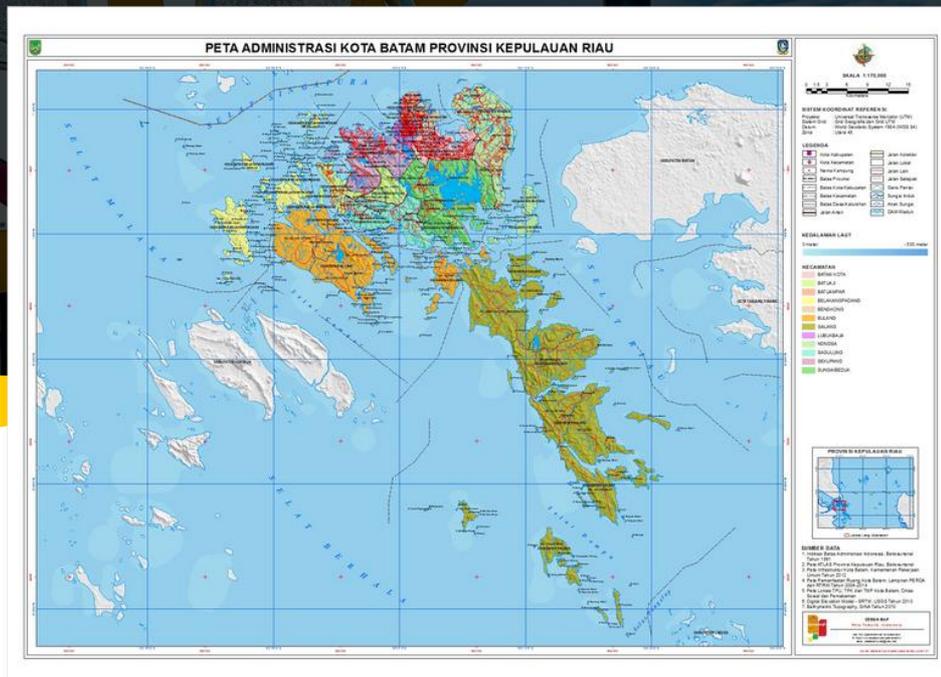
Sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya dikawasan selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Boreang. Menurut dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun(BBK).

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam). Kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

Sejarah Kota Batam

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perang perjuangan Laksamana hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, pulau batam di tetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri pulau batam atau dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan batam. Kini menjadi badan Pengusahaan (BP Batam). Sering pesatnya perkembangan pulau Batam, Pada Dekade 1980-an, berdasarkan peraturan Pemerintahan Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang Merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintah dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilalukan Otorita Batam (BP Batam). Di era reformasi pada akhirnya dekade tahun 1990-an dengan Undang-undang no 53 tahun 1999,

maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintahan Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsetakan Badan Otorita Batam (BP Batam).



INFORMASI GEOGRAFI

Memiliki luas wilayah daratan seluas 715km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1575 km², kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius . kota ini memiliki daratan yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanoa mengikuti musim. Peran pemerintah kota batam mengurus segala administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maupun sumber daya manusia. Pada tanggal 5 Januari 2011, diselenggarakan pemilihan walikota dan wakil wali kota Batam. Melalui proses yang tertib dan aman terpilih dan ditetapkan Ahmad Dahlan dan Muhammad Rudi sebagai wali kota dan Wakil Wali kota Batam periode 2011-2016. Saat ini wali kota Batam di jabat oleh Muhammad Rudi untuk periode 2016-2021, didampingi oleh Amsakar ahmad sebagai Wakil Wali Kota Batam.



Bintan

Salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Riau Indonesia.

Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2006, tetanggal 23 Februari 2006.

Sejarah Kabupaten Bintan

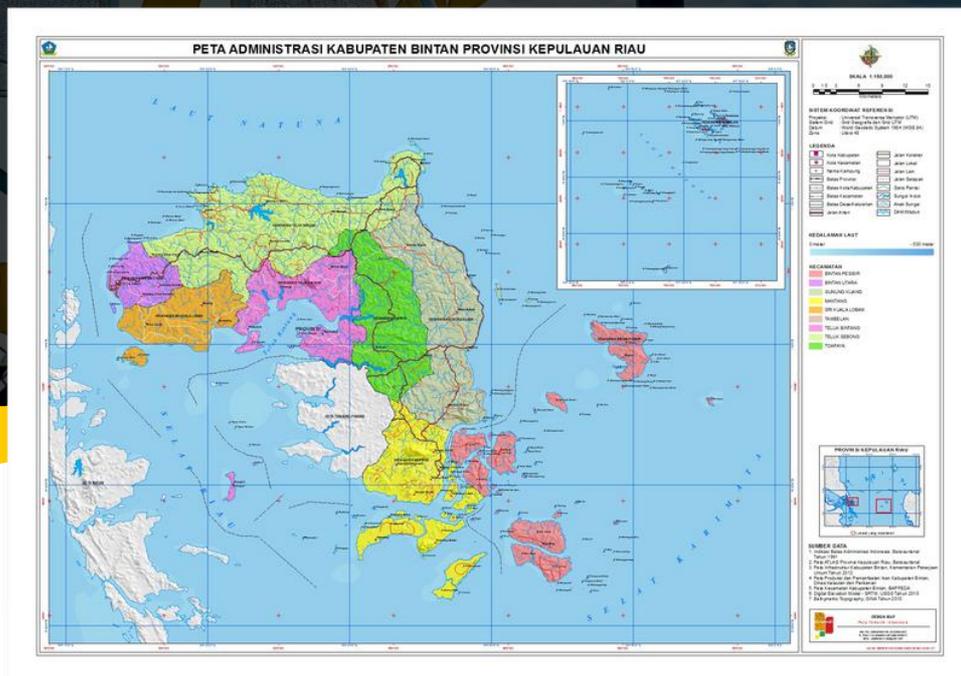
Masa Kerajaan Riau Lingga & Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan) telah dikenal beberapa abad silam di belahan nusantara dan juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terbear di laut Cina Selatan. Karena itulah, julukan “Bumi Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada didaerah ini.

Pada kurun waktu 1722-1911, di kepulauan Riau terdapat dua kerajaan Melayu yang berkuasa dan Berdaulat, yakni kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya berada di daek dan Kerajaan Melayu dengan pusat pemerintahannya berada di Pulau Bintan.

Jauh sebelum ditandatangani Treaty Of London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi wilayah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan Sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya berada di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, pemerintahan Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Oder Districh Thoarden untuk daerah yang agak kecil.

Pemerintahan Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah Keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling, yaitu Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau – Lingga, Indragili Hilir dan kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang dan sebagai penguasa tunggal dan penanggung jawab dalam Afdelling ini ditunjuk seorang Residen.

Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh seorang Asisten Residen (dibawah) perintah Residen. Dalam tahun 1940 keresidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatra Timur) dan sebelum tahun 1945-1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No.9 dibentuk daerah Zelf Bestur (daerah Riau).



INFORMASI GEOGRAFI

Letak Geografis dan Batas-batas wilayah Kabupaten Bintan terletak antara $0^{\circ}6'17''$ Lintang Utara – $1^{\circ}34'52''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}12'47''$ Bujur Timur isebelah barat – $108^{\circ}2'27''$ Bujur Timur disebelah Timur.

Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan Utara : Kabupaten Natuna ; Selatan : Kabupaten Liangga; Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam ; Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluass adalah Kcamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km².

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah iataranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum perpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan.



salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota kabupaten karimun terletak di tanjung balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 Km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km², kabupaten karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten karimun berbatasan dengan kepulauan meranti di sebelah Barat. , pelalawan dan indragiri hilir di selatan, selat malaka disebelah utara, dan kota batam di sebelah timur.



Lingga

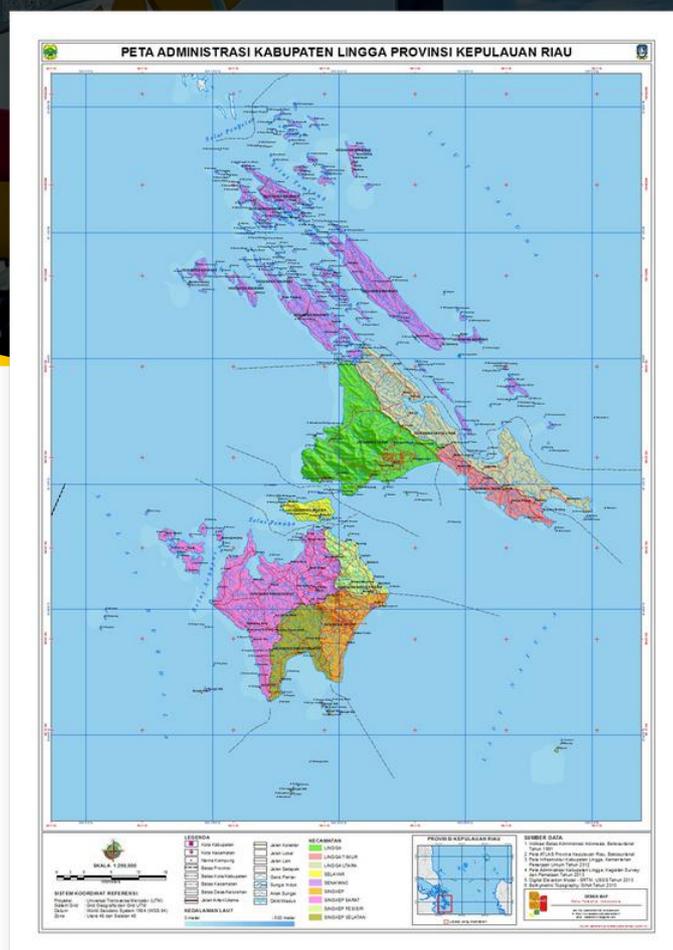
Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Lingga memiliki 13 kecamatan, 7 kelurahan, dan 82 desa, dengan jumlah penduduk 98.633 jiwa (2020)

Sejarah Kabupaten Lingga

Pada Zaman dahulu asal usul sebuah kerajaan Melayu di Lingga yang berpusat di Kota Daik sebagai Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sultan Mahmud Syah II (1685 – 1699) adalah Sultan Johor-Riau-Lingga-Pahang atau kemaharajaan melayu yang ke-10. Ia adalah keturunan sultan-sultan Malaka, sultan ini tidak mempunyai keturunan, untuk penggantinya dicarilah dari keturunan Datuk Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil yang diberi gelar Sultan Mahmud Syah III. Pada masa ini sultan Mahmud Syah III masih sangat muda jadi yang menjalankan pemerintahan ialah yang dipertuan muda Daeng Kamboja yang dipertuan Muda III, jadi ialah yang paling berkuasa di kemaharajaan di Melayu Lingga. Yang menjadi Datuk Bendahara pada saat itu adalah Tun Hasan, semasa ini pula hubungan pemerintahan dengan Belanda masih lancar. Sedangkan di Riau berdatangan pedagang-pedagang dari India. Sedangkan pedagang cina pada saat itu masih menetap di Kepulauan Nusantara dan pada saat ini juga yang mendampingi yang dipertuan muda melaksanakan tugasnya untuk diwilayah Riau Engku Kelana Raja Haji.

INFORMASI GEOGRAFI

wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1 %) dan lautan 209.654 km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni. Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 km² (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 km² (95,09%). Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Lingga terdiri dari 5 Kecamatan (Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, dan Kecamatan Senayang) dan 59 Desa/Kelurahan. Jika dilihat dari topografinya, maka sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 73.947 ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah datarnya hanya sekitar 11.015 ha.



Sejarah Kabupaten Lingga

Setelah yang dipertuan muda III Daeng Kamboja wafat tahun 1777 yang menggantikannya adalah Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji. Raja Haji ini memerintah dari tahun 1777 – 1784. Sewaktu berada di bawah pemerintahannya pecah perang antara kemaharajaan melayu dengan kompeni Belanda di Melaka. Setelah Raja Haji wafat lahirlah sebuah perjanjian antara kemaharajaan melayu dengan pihak kompeni Belanda. Perjanjian ini dikenal TRACTAAT AL TOOSE DURENDE GETROO WE VRIENDE BOND GENO OT SCHAP yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 1784.

Setelah di tinggalkan Raja Haji yang menjadi Di Pertuan Muda Riau, berikutnya adalah Raja Ali (Anak dari Daeng Kamboja). Masa jabatan dari tahun 1785-1806 ia sebagai yang dipertuan muda ke-V ia lebih banyak berada di luar wilayah kerajaan sebab kekuasaan pada saat itu lebih banyak berada di Belanda. Lama kelamaan ia mengadakan perlawanan dan akhirnya sejak tahun 1785 menetaplah ia di Suka Dana (Kalimantan). Tahun ini juga kompeni Belanda mengangkat Resident Belanda pertama di Tanjungpinang dengan nama DAVID RUNDE pada tanggal 17 Juni 1785.

Pada tahun 1787 Sultan Mahmud Syah III memindahkan pusat kerajaannya ke Daik Lingga, ini diakibatkan adanya tekanan dari Kompeni Belanda. Walaupun pusat kerajaan berada di Pulau Lingga, wilayah masih meliputi Johor-Pahang dimana daerah tersebut Sultan masih diwakili oleh Datuk Temenggung untuk bagian Johor dan Singapura sedangkan Datuk Bendahara untuk daerah Pahang. Untuk tahun 1795 terjadi perkembangan politik baru di negeri Belanda, dimana kompeni Belanda harus menyerahkan beberapa daerah yang didudukinya ke Inggris. Masa ini disebut juga sebagai masa INTEREGNUM Inggris di Riau.

Sejarah Kabupaten Lingga

Tahun 1802 yang dipertuan muda V berada dipengungsian kembali di Lingga pada masa intregnum Inggris ini berlangsung Raja Ali wafat 1795-1816 di pulau Bayan. Tahun 1806 diangkat pula Raja Jakfar menjabat kedudukan sebagai yang dipertuan Muda Riau pada tahun 1806-1813. Raja Jakfar membuat tempat pemerintahannya di kota Rentang di Pulau Penyengat. Pada tahun 1811 Sultan Mahmud III memerintahkan anaknya Tengku Husein (Tengku Long pergi ke Pahang dan menikah disana dengan puteri Tun Khoris atau adik bendahara yang bernama Tun Ali. Semasa Tun Husin (Tengku long) berada dipahang ayahandanya Sultan Mahmut Syah wafat di Daik Lingga tanggal 12 Januari 1812.

Setelah Sultan Mahmut syah III meninggal dicarilah calon pengantinya. Akhirnya yang dilantik sebagai sultan pengganti yaitu Tengku Abdul Rahman yang disetujui oleh pembesar kerajaan dan dari pihak Belanda. Ini dikuatkan oleh peraturan kerajaan Lingga Riau yang berbunyi Sultan baru harus dilantik sebelum jenazah Sultan yang wafat di kebumikan.

Setelah Tengku Abdul Rahman dilantik tahun 1812 Sultan Abdul Rahman Syah menetap di Lingga. Mulailah Lingga masa itu bertambah ramai karena telah ada tambang timah disingkep. Sedangkan Raja Ja'far menetap di Penyengat ia telah menempatkan orang-orang kepercayaannya di Daik Lingga untuk mendampingi Sultan yaitu Engku Syaid Muhammad Zain Al Qudsi, Suliwatang Ibrahim, sahbandar Muhammad Encik Abdul Manan dan bagian pertahanan dan keamanan adalah Encik Kalok. Tengku Husin tinggal di Lingga, dia menetap di penyengat.

Pada tanggal 19 Agustus 1818 Wiliam Farquhan Residen Inggris dari Malaka datang ke Daik untuk bertemu dengan Sultan Abdul Rahman Muazam Syah dan memberitahukan bahwa wilayah kerajaan Lingga Riau mungkin akan diambil Belanda. Sultan Abdul Rahman Muazam Syah menjawab berita yang disampaikan Fanquhan itu, bahwa dia tidak mempunyai wewenang untuk mengurus urusan kerajaan, hanya ia menganjurkan Fanquhan dapat menghubungi Raja Ja'far.

Sejarah Kabupaten Lingga

Sultan Mahmud Riayat Syah III pada zaman dia memegang tampuk pemerintahan, dia membangun istana Robot/istana kota baru dan dia juga membangun penjara/Gail. Sedangkan Almarhum Raja Muhammad Yusuf sangat alim dia ini adalah penganut Nak Sabandiah. Dia adalah yang dipertuan muda ke X yang dilantik tahun 1859 oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah III. Pada zaman ini di Daik sangat berkembang dibidang agama maupun bidang ekonomi, sehingga Daik Lingga pada waktu itu menjadi pusat perdagangan dan pengetahuan. Banyak pedagang yang datang seperti cina, bugis, keling, siak, Pahang.

Belanda sudah semakin khawatir kalau Lingga menyusun kekuatan untuk menentangnya, oleh karena itu, Belanda menempatkan asisten Residen di Tajung Buton Daik. Pada tanggal 17 September 1833 dia mangkat dan dimakamkan di bukit Cengkih. Sedangkan yang dipertuan muda Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi beristrikan Tengku Embung Fatimah Binti Sultan Mahmud Muzafarsyah yang merupakan Sultanah di Lingga. Dia menggalakan kerajinan rakyat Lingga untuk dipasarkan keluar kerajaan Lingga. Pada zaman mereka membuka jalan Jagoh ke Dabo membuat kapal-kapal, di antara nama kapal-kapal tersebut Kapal Sri Lanjut, Gempita, Betara Bayu, Lelarum dan Sri Daik, guna untuk memperlancar perekonomian rakyat serta pada zaman dia juga istana Damnah di bangun. Sekolah sd 001 Lingga tahun 1875 dengan guru pertama kami Sulaiman tamatan sekolah Raja di Padang. Guru ini tidak mau bekerja sama dengan Belanda, walaupun dia diangkat oleh Belanda.

Pada zaman ini Lingga mencapai zaman keemasan, sedangkan Almarhum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II adalah anak dari Sultan Abdul Rahman Syah. Dia diangkat menjadi Sultan tidak disetujui oleh Indra Giri Reteh selama 25 hari dan terkenal dengan nama pemberontakan Mauhasan. Namun Reteh tunduk kembali dengan Lingga. Sultan ini sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya antara lain:

Sejarah Kabupaten Lingga

Mengajukan dan menukarkan sawah padi dengan sagu (Rumbia) yang di datangkan dari Borneo Serawak dan membuka industri sagu tahun 1890. Membuka penambangan timah di Singkep dan Kolong-kolong Sultan dengan Mandor yang terkenal npada zaman itu La Abok dan kulinya orang-orang Cina Kek yang menurut ceritanya nama inilah nama Dabo Singkep. Baginda mangkat pada tanggal 28 Fenruari 1814 dan dimakamkan di Bukit Cengkih dengan gelar Marhum Keraton yang di dalam kubah. Setelah itu Sultan Muhammad Muazam Syah (1832-1841) Sultan ini sangat gemar dengan seni ukir/Arsitektur, dia mengambil tukang dari Semarang untuk membangun istana yang disebut Keraton atau Kedaton.

Pada zaman ini seni ukir, tenun, kerajinan, Mas dan perak sudah ada. Pusat kerajinan tenun di Kampung Mentuk, kerajinan Tembaga di kampung Tembaga. Pada zaman dia juga Bilik 44 dibangun, namun belum sempat di bangun, namun belum sempat siap bertepatan dia mankat dan pengantinya tidak melanjutkan pembangunan gedung tersebut.

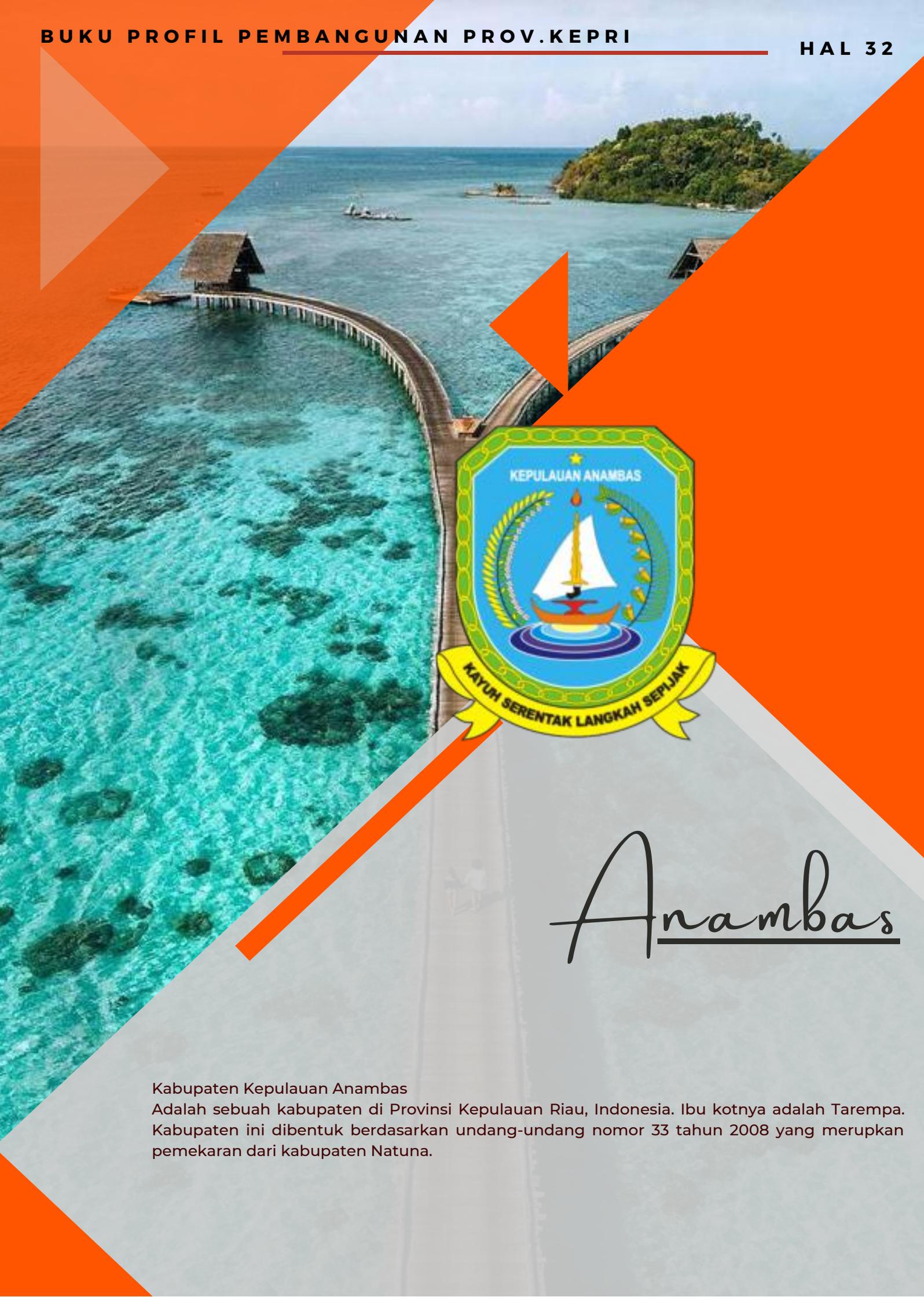
Sultan Abdul Rahman Syah 1812-1832 adalah putra Sultan Mahmud Riayat Syah III dia terkenal sangat alim dan giat menyebarkan agama islam serta mengemari pakaian Arab. Pada masa pemerintahan dia, saudaranya Tengku Husin dengan bantuan Inggris dilantik menjadi raja dengan gelar Sultan Husin Syah. Maka pecahlah kerajaan besar Melayu atau emporium Melayu Johor-Riau-Lingga menjadi 2 bagian. Istana Sultan Abdul Rahman Syah terletak di Kampung Pangkalan Kenanga sebelah kanan mudik sungai Daik.

BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH

Sejarah Kabupaten Lingga

Dia mangkat malam senin 12 Rabiul awal 1243 Hijriah (19 Agustus 1832) di Daik, dimakamkan di Bukit Cengkih bergelar Marhum Bukit Cengkih. Pada zaman dia, Mesjid Jamik didirikan atau Mesjid Sultan Lingga, benteng-benteng pertahanan di Mepar, Bukit Cening, Kota Parit (Dibelakang Kantor Bupati Lama) serta Benteng Kuala Daik, Meriam pecah Piring dan Padam Pelita terdapat di mes Pemkab Lingga. Pada zaman dia memerintah, dia sering berperang melawan penjajahan Belanda bersama dengan Yang Dipertuan Muda Riau diantaranya Raja Haji Fisabilillah atau bergelar Marhum Ketapang. Dia mangkat 18 Zulhijah 1226 Hijriah (12 Januari 1912) di Daik di belakang Mesjid dengan Bergelar Marhum Masjid.

Sultan Mahmud Riayat Syah adalah Sultan yang pertama kali di Daik Lingga. Dia adalah Sultan Johor-Pahang-Riau-Lingga XVI yang memindahkan pusat kerajaan Melayu ke Bintan Hulu Riau ke Daik tahun 1787, dengan istrinya Raja Hamidah (Engku Putri) yang merupakan pemegang Regelia kerajaan Melayu-Riau-Lingga. Pulau penyegat Indra Sakti adalah mas kawinnya dan pulau penyegat tersebut menjadi tempat kedudukan Raja Muda bergelar Yang Dipertuan Muda Lingga yaitu dari darah keturunan Raja Melayu dan Bugis. Pada hari senin pukul 07.20 Wib tahun 1899 dia mangkat dan dimakamkan di Makam Merah dengan Bergelar Marhum Damnah.



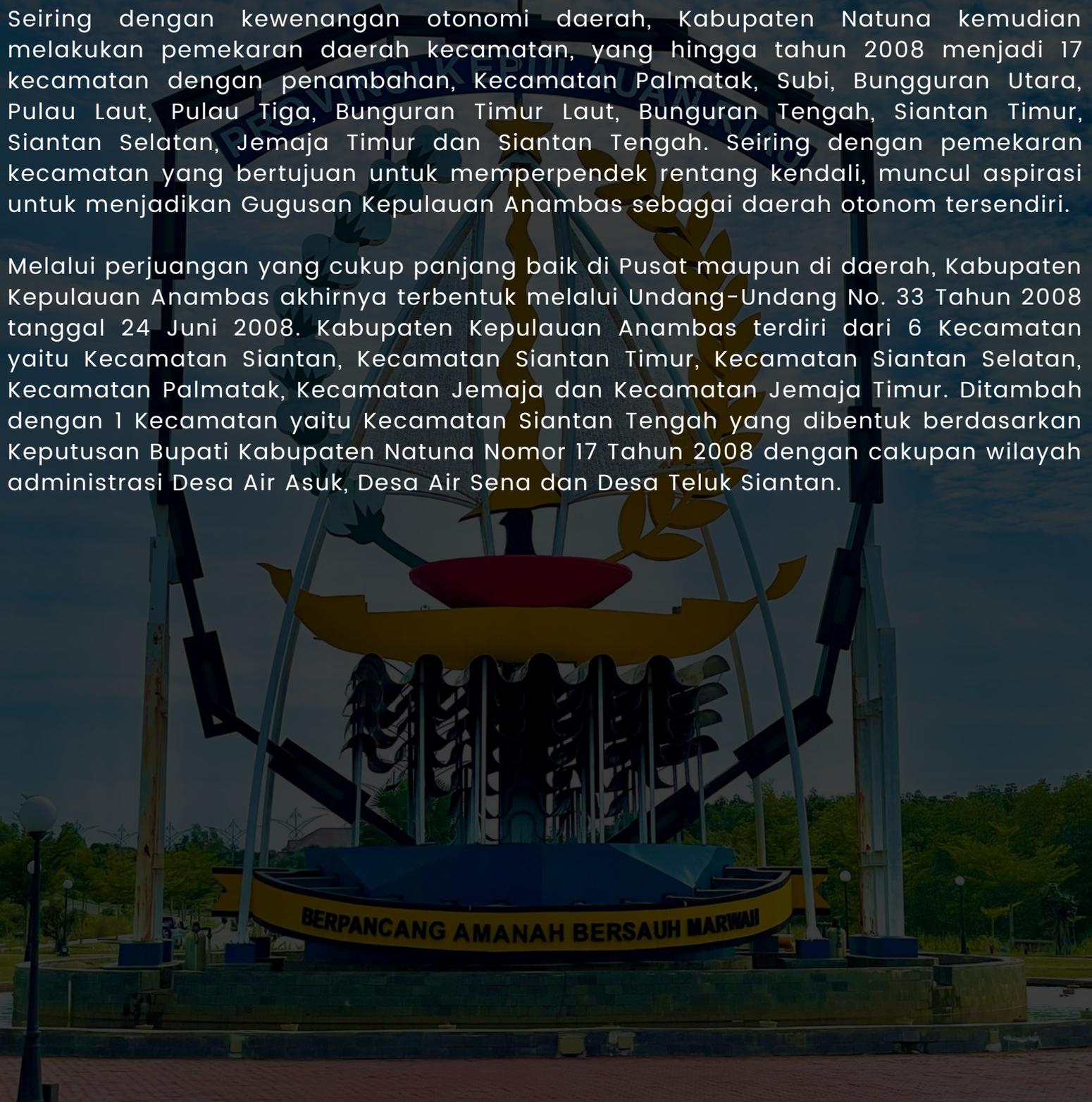
Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas
Adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kotnya adalah Tarempa.
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Natuna.

Sejarah Kabupaten Kep. Anambas

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga tahun 2008 menjadi 17 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri.

Melalui perjuangan yang cukup panjang baik di Pusat maupun di daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Ditambah dengan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 dengan cakupan wilayah administrasi Desa Air Asuk, Desa Air Sena dan Desa Teluk Siantan.



BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH



Natuna

Salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kemboja, di selatan berbatasan dengan Sumatra Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Koera Selatan dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel. Sedangkan gas bumi 112.356.680.000. barel. Hewan khas Natuna adalah kekah.

Sejarah Kabupaten Natuna

Sejarah kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena Sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan bahagian dari Wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Drs. H. Andi Rivai Siregar oleh Merantri Dalam Negeri ad interm Jendral TNI Faisal Tanjung di Jakarta. Berdasarkan surat Keputusan Delgasi Republik Indonesia Provinsi Sumatra Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonomi tingkat II dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanaan sebagai berikut:

- Kewedanaan Tanjungpinang, Meliputi Bintang Selatan (termasuk Bintang Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
- Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur Dan Moro
- Kewedanaan Lingga, meliputi Lingga, Singkep Dan Senayang
- Kewedanaan Pulau Tujuh, Meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan,

Kewedanaan Pulau Tujuh, Meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat Dan Bunguran Timur beserta kewedanaan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

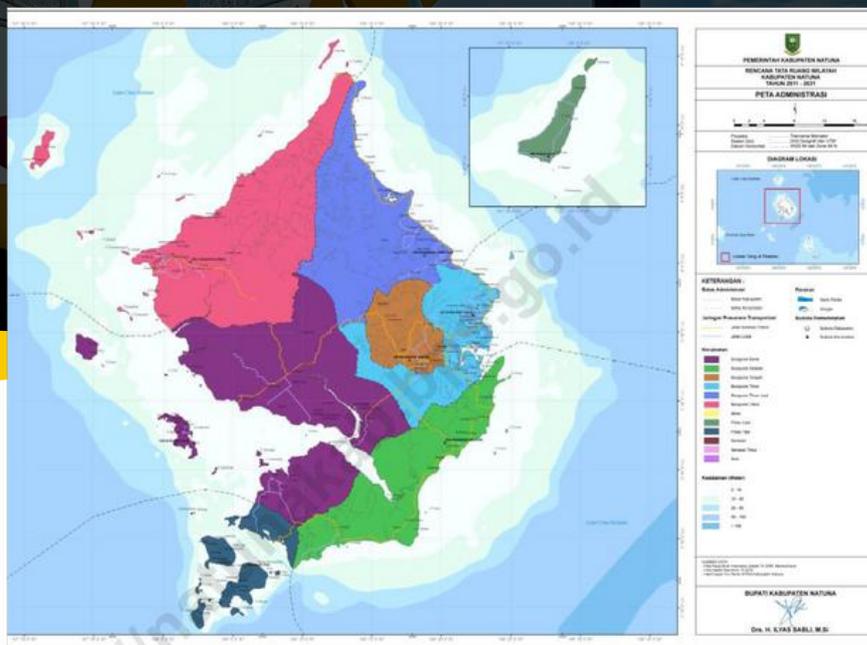
Sejarah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai Dan Serasan An Satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah Kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan , Kecamatan Pal Matak, Subi , Bunguran Utara, Dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.

Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya Adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur Dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75.

Pada Tahun 2008 Kabupaten Natuna melakukan pemekaran dengan dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Lalu hingga tahun 2015 menjadi 70 desa dan 6 kelurahan, dan akan ada 3 Kecamatan pemekaran sehingga menjadi 16 Kecamatan.



INFORMASI GEOGRAFI

Kabupaten Natuna mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 Km² dengan luas daratan 2.001,30 Km² dan lautan 262.197,07Km². Secaraadministrasi pemerintahan Kabupaten Natuna terdiri dari 12 Kecamatan (Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, BunguranTengah, Bunguran Selatan, Serasan, Subi dan Serasan Timur) . Jumlahpulau yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau, dengan127 pulau diantaranya belum berpenghuni. Kabupaten Natuna terletak di antara 1° 16' - 7° 19' Lintang Utara dan 105° 00' - 110°00' Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Natuna, antaranya: **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Malaysia Bagian Timur (Serawak) dan Kalimantan. **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Kabupaten Bintan. **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas



**20
22**

PROFIL EKONOMI

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PENGANTAR

Sejarah kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena Sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan bahagian dari Wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Drs. H. Andi Rivai Siregar oleh Merantri Dalam Negeri ad interm Jendral TNI Faisal Tanjung di Jakarta.

Berdasarkan surat Keputusan Delgasi Republik Indonesia Provinsi Sumatra Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonomi tingkat II dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanaan sebagai berikut:

- Kewedanaan Tanjungpinang, Meliputi Bintang Selatan (termasuk Bintang Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
- Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur Dan Moro
- Kewedanaan Lingga, meliputi Lingga, Singkep Dan Senayang
- Kewedanaan Pulau Tujuh, Meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan,

Kewedanaan Pulau Tujuh, Meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat Dan Bunguran Timur beserta kewedanaan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

TUJUAN PEMBANGUNAN

01

**PERCEPATAN PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

02

**OPTIMALISASI POTENSI MARITIM
DAN LINGKUNGAN**

03

**TERWUJUDNYA PENGUATAN
JARING PENGAMAN SOSIAL**

04

**TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAN
KARAKTER MANUSIA YANG UNGGUL**

05

**TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG
BERSIH, KUAT DAN ANTISIPATIF**

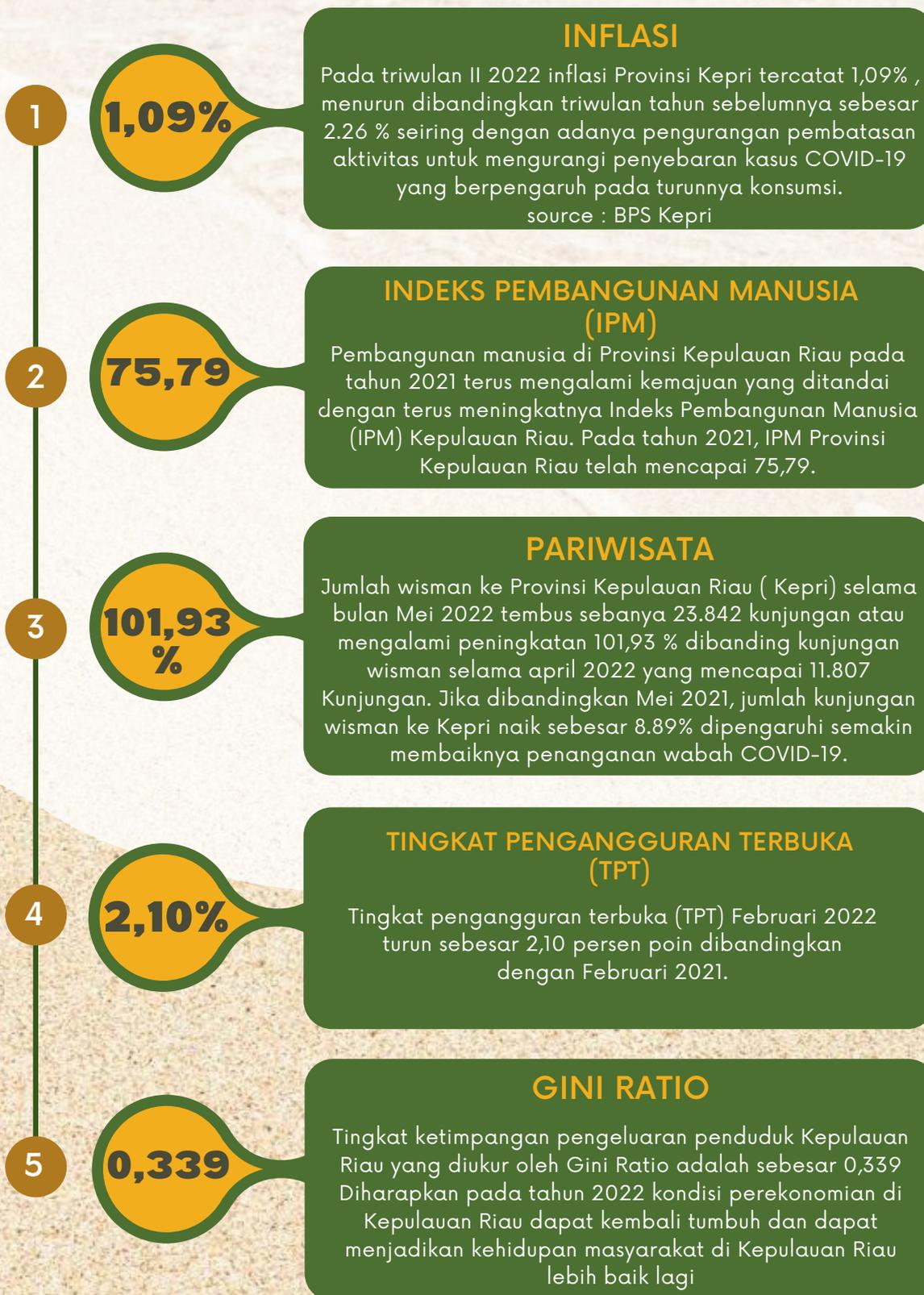
06

**TERWUJUDNYA BIMBINGAN BERAGAMA,
PELESTARIAN BUDAYA & KERUKUNAN**

07

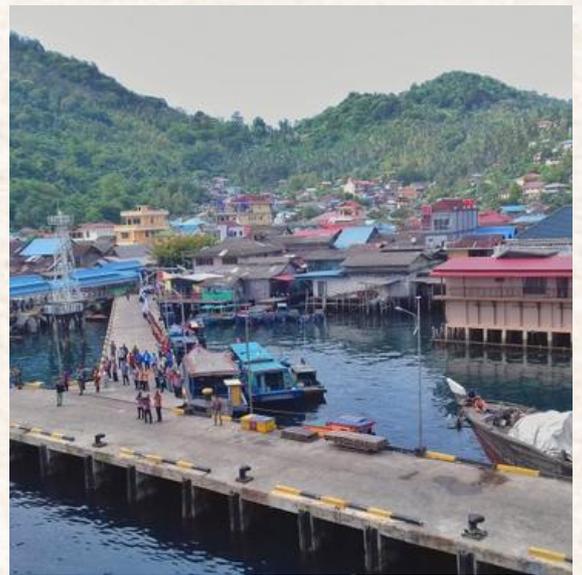
**PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR & INTEGRASI ANTAR
PULAU**

KONDISI PEREKONOMIAN KEPULAUAN RIAU



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 yaitu: “Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim Melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan”.



Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu:

- 1).Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
- 2).Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
- 3).Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas
- 4).Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman
- 5).Pemantapan tata kelola pemerintahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor, dilakukan pengarusutamaan meliputi: Kesetaraan gender; Tata Kelola (Governance); Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim; Modal Sosial Budaya; dan Transformasi Digital. Secara khusus arah kebijakan terkait dengan Pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial Pasca Pandemi Covid-19 diuraikan sebagai berikut:’

1. Penguatan sektor kesehatan
2. Penguatan perlindungan sosial
3. Pembangunan sumberdaya manusia
4. Akselerasi investasi
5. Pemulihan industri dan perdagangan
6. Pemulihan Pariwisata
7. Penguatan sistem penanganan bencana
8. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar



Arah kebijakan terkait dengan Pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial Pasca Pandemi Covid-19 diatas selanjutnya akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 1. Target Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	Karimun	6,85	6,10	5,20
2	Bintan	7,50	3,40	6,40
3	Natuna	4,50	3,75	4,50
4	Lingga	6,93	11,49	3,91
5	Kepulauan Anambas	3,00	4,01	5,66
6	Kota Batam	4,60	3,09	5,29
7	Kota Tanjungpinang	5,26	9,10	5,45
	Propinsi Kepulauan Riau	5 + 1	5,68	6,60

Sumber : BPS Kepri (2021)

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Seiring dengan Pandemi Covid-19, dilakukan perubahan proyeksi indikator makro sesuai dengan arah pengembangan wilayah Sumatera, khususnya pada indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 3,9–5,1%, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat menjadi sebesar 7,2%; dan Persentase penduduk miskin meningkat menjadi sebesar 5,78%.



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun - 1

Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Tahun - 2

Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Tahun - 3

Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Tahun - 4

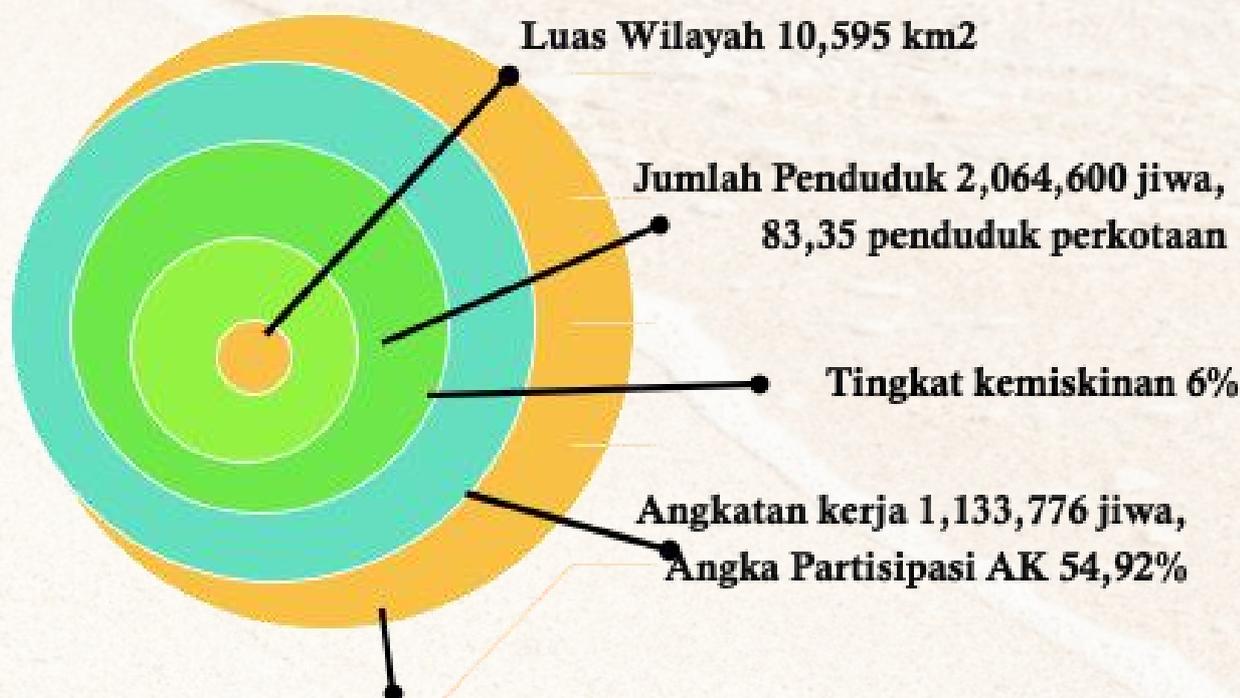
Pemerataan Pembangunan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Tahun - 5

Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERTUMBUHAN EKONOMI



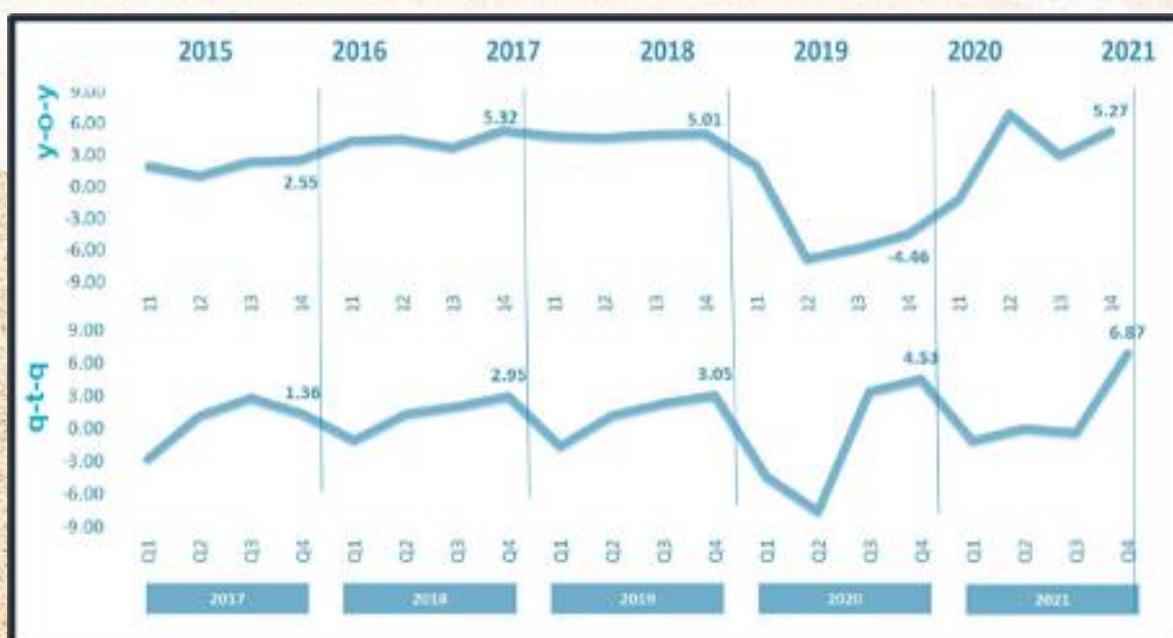
PDRB 174,976 atau 2% dari PDB Nasional, dengan komposisi sektor primer 17,38% dan sektor sekunder 59,94% dan sektor tersier 22,68%.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19.

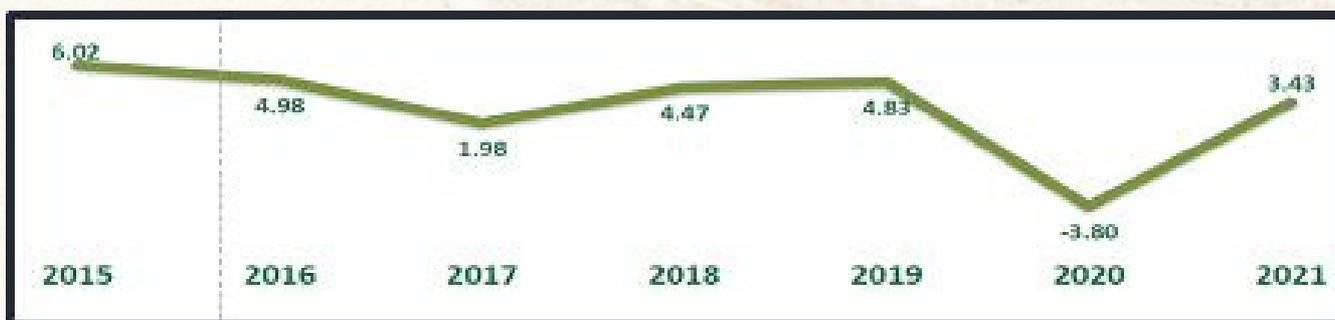
Namun pemerintah Propinsi Kepri terus berupaya keras mengatasi berbagai persoalan akibat pandemic tersebut, hal ini ditunjukkan oleh semakin membaiknya tren ekonomi di Kepri, meski pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 3,8% pada tahun 2020 kemudian tumbuh sebesar 3,43% pada tahun 2021.

Kontraksi ini terutama disebabkan oleh kategori kontruksi yang memberikan andil sebesar -1,19 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar -1,08 dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dengan andil kontraksi sebesar -0,97 persen dengan komposisi sektor primer 17,38% dan sektor sekunder 59,94% dan sektor tersier 22,68%.

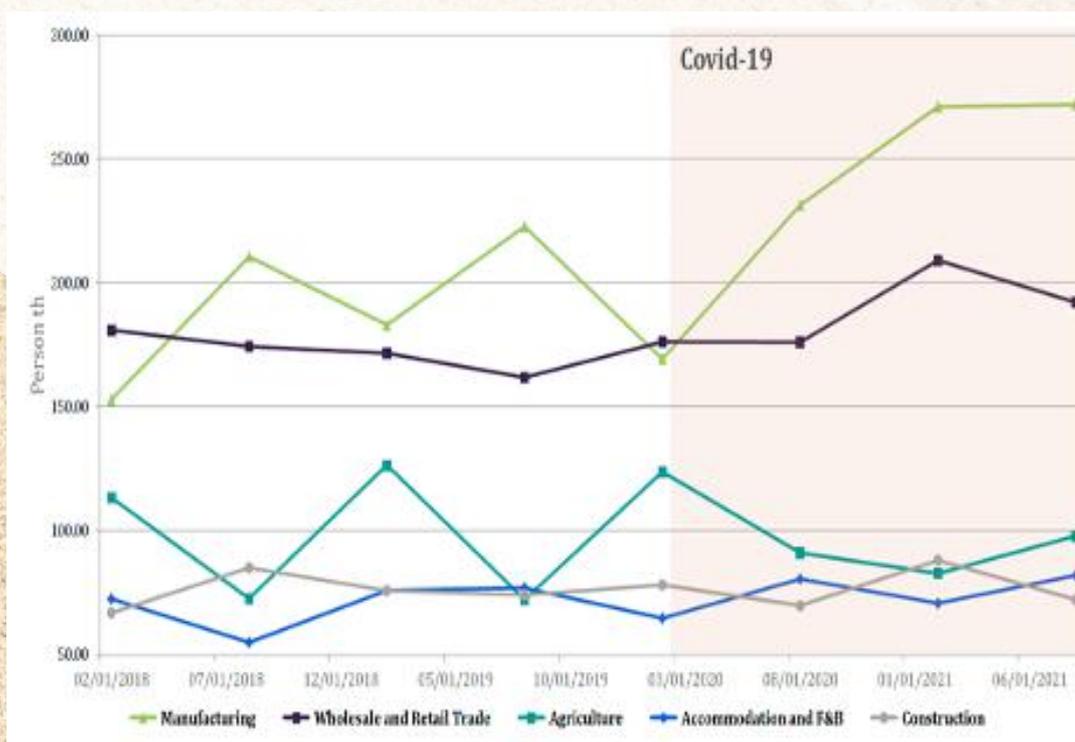


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Meskipun pandemi, Kepulauan Riau mencatat rekor tingkat investasi asing pada tahun 2020, dengan arus masuk FDI melebihi US\$ 1,65 miliar, mencakup 2.294 proyek. Penyuntikan modal terbesar terjadi pada industri logam dasar dan barang dari logam serta industri permesinan, elektronika, dan barang presisi. Sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 adalah perusahaan/jasa usaha (14,40%), diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial (12,30%), informasi dan komunikasi (9,59%), manufaktur (6,45%), dan konstruksi (4,74%).



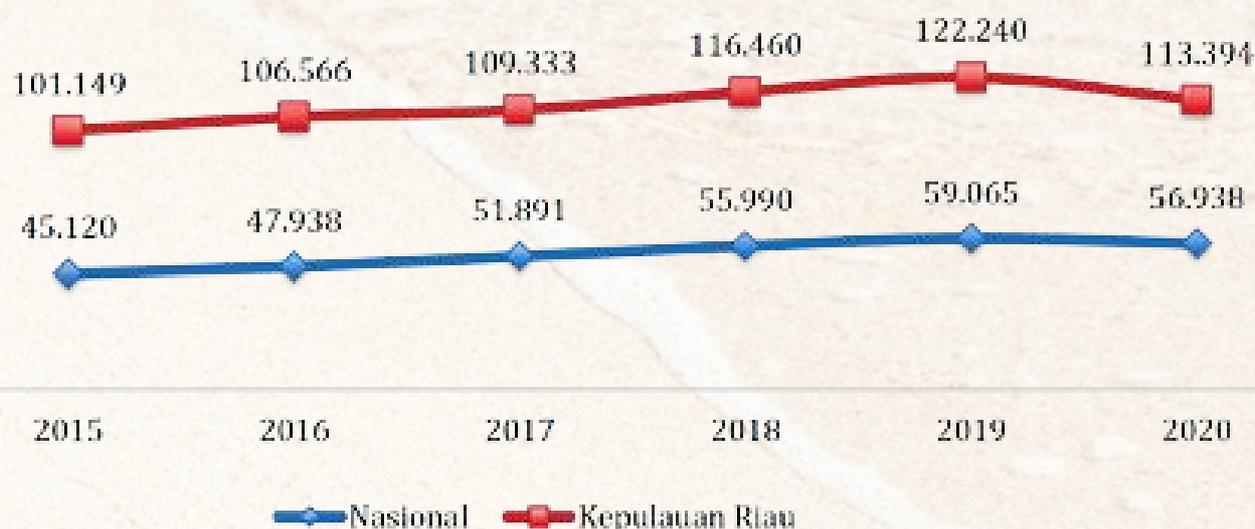
Gambar Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Kepri 2015 - 2021



Gambar 2. Kosentrasi Pekerja Pada Sektor Manufaktur dan Pariwisata Kepri

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Propinsi Kepulauan Riau memiliki nilai PDRB lebih tinggi dibanding PDB perkapita nasional, sehingga secara umum dapat dikatakan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau semakin baik. Pendapatan perkapita tertinggi terdapat pada wilayah yang didominasi.



Sumber : BPS Kepri, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 1,19%. Jika dibandingkan dengan triwulan IV-2020 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,12%. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2021 memberikan kontribusi sebesar 7,65% terhadap PDRB Pulau Sumatera.

Triwulan II Ekonomi Kepri tumbuh 6,9%. Pengukuran ini berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp67,76 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp44,57 triliun. Jika dibandingkan ekonomi Kepri pada triwulan I tahun 2021

Perekonomian Kepri triwulan kedua tumbuh sebesar 0,01%. Sampai dengan triwulan II-2021, secara kumulatif (c-to-c) pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 2,69% disbanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan II-2021 memberikan kontribusi sebesar 7,45% terhadap PDRB Pulau Sumatera.

Triwulan ketiga 2021 Ekonomi Kepri tumbuh 2,97%. pengukuran ini berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp67,9 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp44,4 triliun. Ekonomi Kepri pada triwulan III-2021 dibandingkan dengan triwulan II-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,39%. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan III-2021 memberikan kontribusi sebesar 7,22% terhadap PDRB Pulau Sumatera.

Akibat pandemic covid-19 terjadi pula hal yang sama yakni penurunan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2020 menjadi sebesar 174.976,70 milyar rupiah dari 181.895,86 milyar rupiah tahun 2019 yang berakibat pada pelemahan sektor penunjang PDRB. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pada sektor koperasi dan UMKM, industri, penanaman modal, lapangan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian.

Secara umum kinerja koperasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu indikatornya adalah persentase koperasi yang aktif. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif adalah sebesar 40,85% atau lebih tinggi dari persentase koperasi aktif tahun 2019 yaitu sebesar 39,93%. Namun, kondisi tahun 2020 tersebut masih rendah dari nilai 55,80% yang menjadi target untuk persentase koperasi aktif.

Potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini terletak pada kelima sektor yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 38,35-40,76 persen selama periode 2015 hingga 2020. Sehingga strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut.

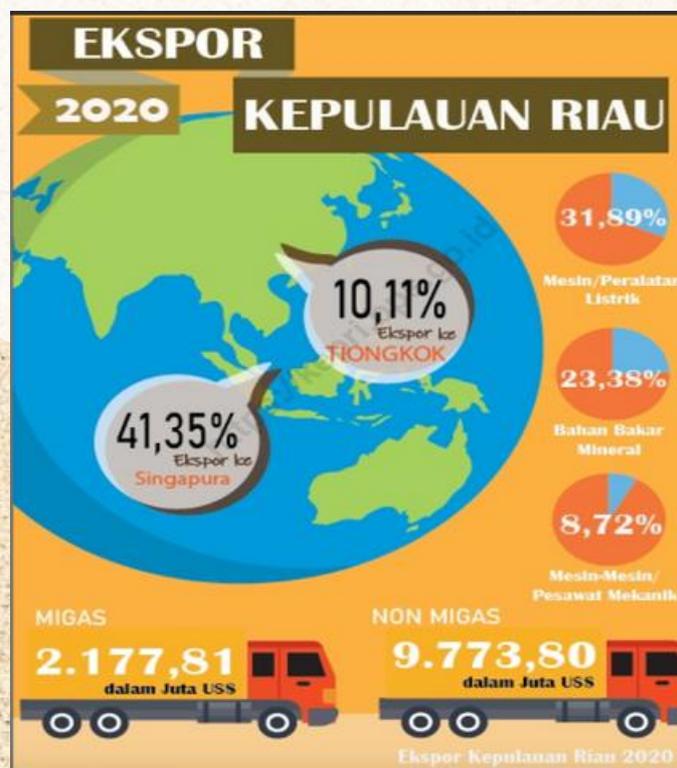
EKSPOR

Tekanan ekonomi akibat pandemic Covid-19 juga berdampak pada aktifitas ekspor-impor barang. Setelah terjadi penurunan ekspor tahun 2020, tetapi tahun 2021 Propinsi Kepri menunjukkan tren positif terhadap perkembangan ekspor.

Tabel Perkembangan Ekspor Propinsi Kepri Tahun 2021

Ekspor	Ekspor (US\$)		
	2021	2020	2019
	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Nilai FOB (\$US)	15 969 000 699.90	11 951 616 425.20	12 789 650 895

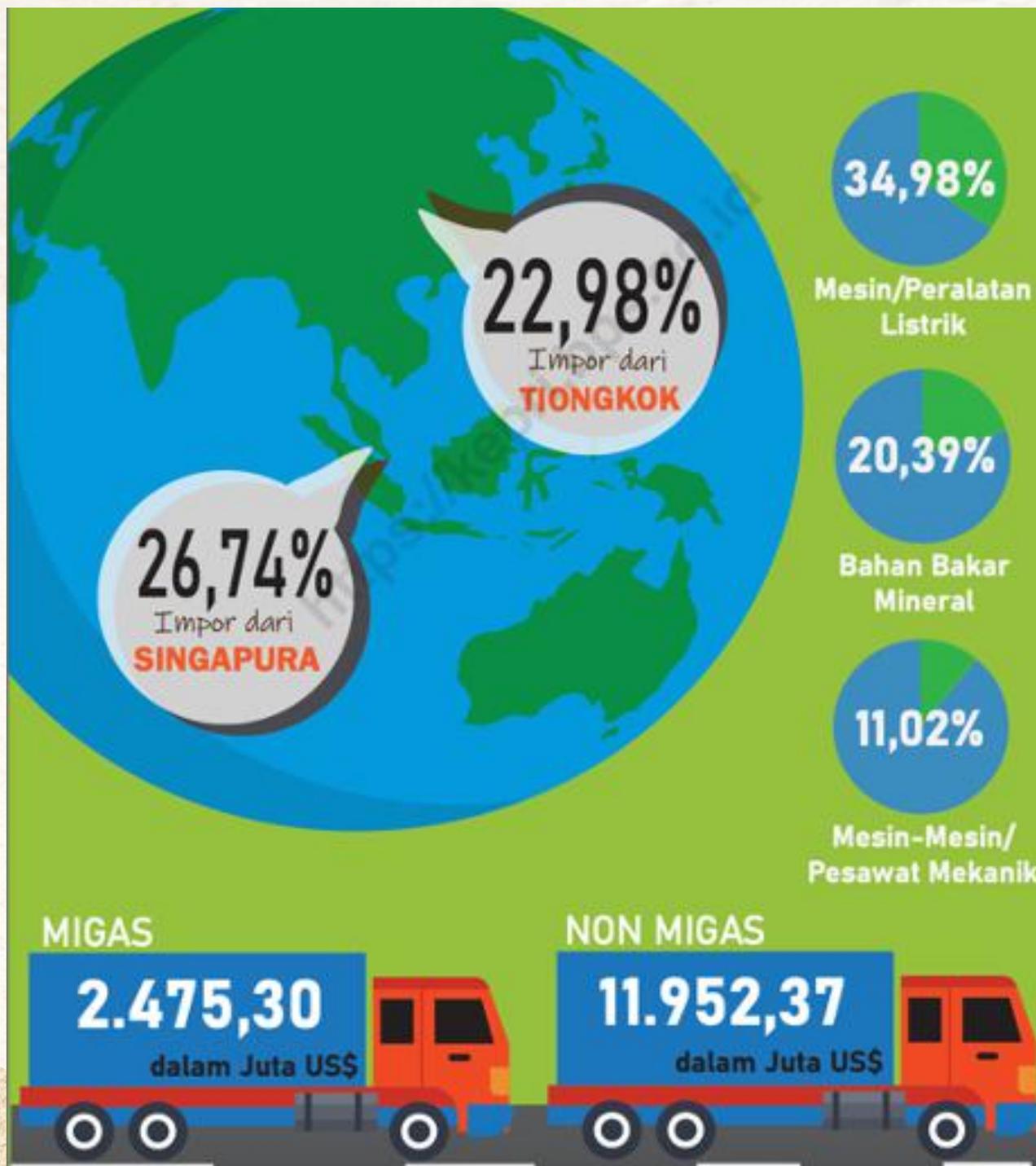
Provinsi Kepulauan Riau memiliki 19 pelabuhan muat ekspor yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Table 2 di bawah terlihat bahwa selama tahun 2020, sebesar US\$5.455,77 juta komoditi ekspor masuk melalui pelabuhan Batu Ampar atau sekitar 45,65% dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan kedua dengan nilai muat terbesar adalah pelabuhan Sekupang dengan nilai US\$1.861,35 juta atau 15,57%.



Pelabuhan ketiga, keempat, dan kelima terbesar adalah pelabuhan Kabil/Panau, Tanjung Balai Karimun, dan Tarempa dengan nilai muat ekspor masing-masing US\$ 1.349,07 juta (11,29%), US\$ 996,81 juta (8,34%), dan US\$ 996,31 juta (8,34%).

Tabel Ekspor Propinsi Kepri Menurut Pelabuhan Tahun 2021

Pelabuhan Muat	Ekspor Menurut Pelabuhan Muat (US\$), Berat, 2021
Batam Perairan	-
Batu Ampar	1471253906.03
Belakang Padang	2424567040
Hang Nadim (U)	8258.50.00
Kabil/Panau	1333508669.02
Kijang	275373922.15
Nongsa	1
Penuba	-
Lobam	23813863.66
Moro Sulit	-
Natuna Ranai	32593.46
Pasir Panjang	879489000
Pulau Laut	-
Pulau Sambu	457610500
Sekupang	169151140.44
Serasan	-
Singkep Dabo	1582545010
Tanjung Balai Karimun	11840914065.89
Tanjung Batu	8538550
Tanjungpinang	83680
Tanjung Uban	-
Tarempa	3156246115.80
Udang Natuna	342458682
Pulau Buluh	-
Matak	-



Pada tahun 2021, total impor untuk Provinsi Kepulauan Riau mencapai sebesar US\$14,43 miliar atau naik sekitar 28,09 persen dibandingkan tahun 2020, dimana kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh naiknya impor di sektor migas yaitu dari US\$1,47 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$2,48 miliar. Hal ini terlihat pada Tabel 1 di bawah bahwa impor sektor nonmigas mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 68,28 persen dibanding tahun lalu. Pada sektor non migas pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan dari US\$9,79 miliar menjadi US\$11,95 miliar atau naik sebesar 22,05 persen.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 14 pelabuhan bongkar sebagai pintu masuk barang-barang impor dari luar negeri. Selama tahun 2021, nilai impor melalui Pelabuhan Batu Ampar merupakan yang terbesar hingga mencapai US\$7,27 miliar atau sekitar 50,38 persen dari total impor di Kepulauan Riau. Sementara itu, total nilai impor pada pelabuhan lainnya tersebut mencapai US\$ 266,28 juta atau 1,85 persen dari total impor Provinsi Kepulauan Riau.

Sektor	Nilai (US\$ Juta)				Perubahan (%)		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Migas	2 172,65	1 593,50	1 470,90	2 475,30	-26,66	-7,69	68,28
Non Migas	9 250,82	9 171,78	9 792,79	11 952,37	-0,85	6,77	22,05
Total	11 423,47	10 765,28	11 263,69	14 427,67	-5,76	4,63	28,09.00

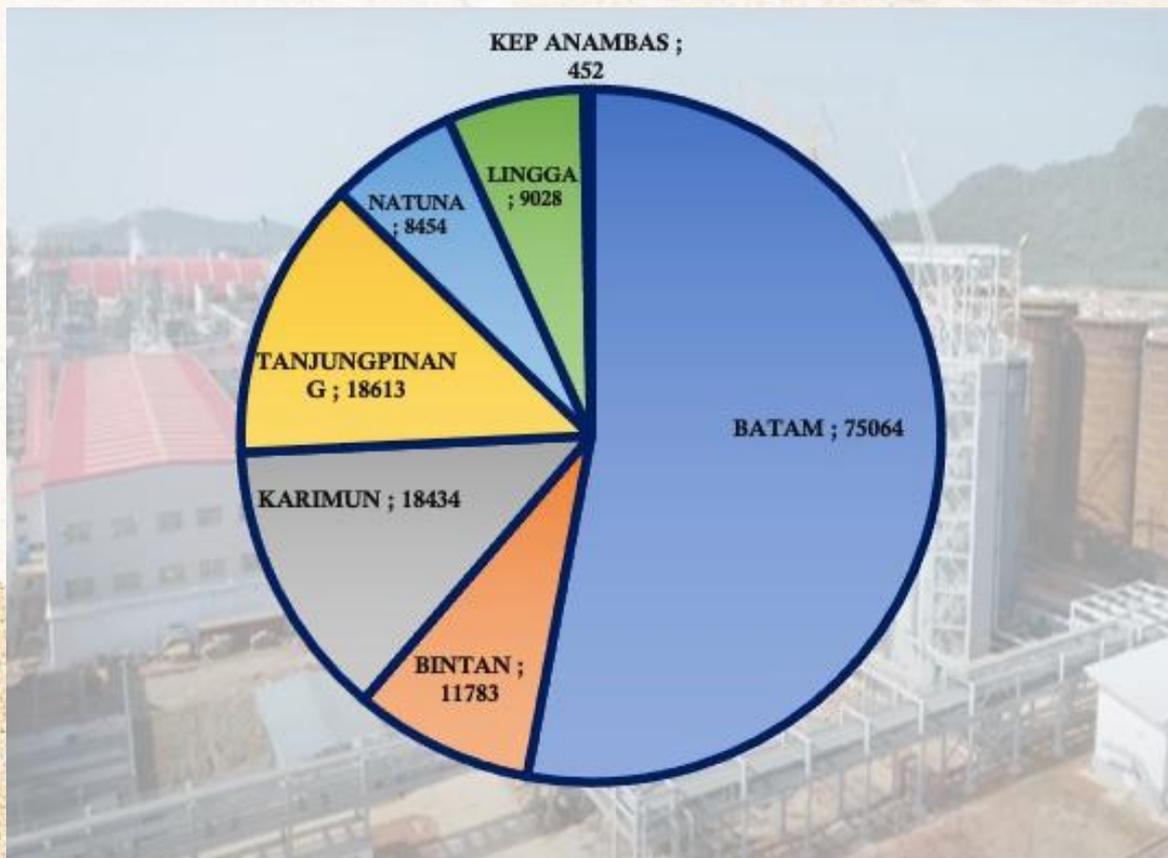
Berdasarkan kabupaten/kota dimana pelabuhan bongkar berada, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar barang-barang impor Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021 dibongkar di Kota Batam. Nilai impor melalui Kota Batam tersebut mencapai sekitar 75,11 persen atau senilai US\$10,84 miliar. Barang-barang impor tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, kebutuhan industri bahkan juga untuk didistribusikan kembali ke kabupaten/kota lainnya.



Tabel Impor Kepulauan Riau Menurut Pelabuhan Bongkar Barang, 2021

PERKEMBANGAN KOOPERASI & UMKM

Di tengah pandemi, koperasi diharapkan mampu melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga dibutuhkan sebagai platform usaha bersama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, UKM mampu mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume dan kualitas yang memadai.



Gambar Data UMKM Propinsi Kepri Tahun 2021

KEBIJAKAN CROSS CUTTING

Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan dari 6,07% pada tahun 2021 menjadi 5,57% pada tahun 2026.
Penanggulangan Stunting	Penurunan prevalensi stunting dari 16,30% pada tahun 2021 menjadi 12,80% pada tahun 2026
Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Rasio Konektivitas Provinsi dari 38,42% pada tahun 2021 menjadi 65% pada tahun 2026.
Pertanian Klaster Regional	Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 2,19 Triliun pada tahun 2026
Jaringan Keterkaitan Pariwisata	Meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 3,49 Triliun pada tahun 2026
Industri Kelautan Perikanan	Meningkatkan PDRB sektor Perikanan dari 3,28 triliun pada tahun 2021 menjadi 3,33 triliun pada tahun 2026
Link and Match Pendidikan Industri	

PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI STRATEGIS





20
22

PROFIL SUMBERDAYA KEMARITIMAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PEMBANGUNAN BIDANG KEMARITIMAN & LINGKUNGAN HIDUP



PENGANTAR

Sektor Kelautan dan Perikanan berperan sangat besar bagi pembangunan Propinsi Kepulauan Riau, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi kelautan perikanan yang sangat besar dan beragam. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia.

Luas wilayah, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 9.982,88 km² berupa daratan dan 415.231,79 km² berupa lautan dan memiliki 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Jumlah pulau yang telah berpenghuni sejumlah 385 pulau, 19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Potensi sebesar ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan program-program pembangunan sektor kelautan perikanan yang bertujuan untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut berkontribusi terhadap pendapatan dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi ruang laut, pembenahan pada infrastruktur, sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan (tangkap dan budidaya), pengembangan industri pengolahan serta dukungan aspek permodalan maupun pemasaran dan pengembangan industri hasil kelautan perikanan.

Propinsi Kepulauan Riau telah mengalami banyak kemajuan dari sektor kelautan dan perikanan, melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan sektor kelautan perikanan tersebut terutama bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan sektor kelautan perikanan di Propinsi Kepulauan Riau menjadi sangat penting sejalan dengan upaya mewujudkan visi misi Gubernur Kepulauan Riau.

PERIKANAN TANGKAP

Jumlah produksi perikanan tangkap adalah jumlah hasil tangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau oleh perusahaan perikanan maupun kelompok nelayan pesisir dan didaratkan di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil evaluasi terhadap jumlah produksi perikanan tangkap dengan target sebesar 306.463,67 ton di tahun 2021 terealisasi sebesar 302.662,78 ton dengan presentase 98,76% atau dalam kategori kinerja sangat tinggi. Namun jika dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 (332.176 Ton), capaian produksi tersebut menunjukkan penurunan sebesar 9,75%.

Tabel Potensi Perikanan Tangkap di Propinsi Kepri

JENIS SUMBER DAYA IKAN (SDI)	ESTIMASI POTENSI SDI (ton/tahun)	ESTIMASI TINGKAT PEMANFAATAN (TON)	PELUANG PENGEMBANGAN PRODUKSI (TON)
Ikan Pelagis	559,828	84,060	475,768
Ikan Demersal	272,594	75,435	197,159
Ikan Karang	17,562	13,568	3,994
Total	849,984	173,063	676,921

Penurunan produksi perikanan tangkap di tahun 2021 disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Masih terjadinya kasus praktik illegal fishing oleh kapal asing yang mengakibatkan terjadinya penurunan stock ikan di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau.
- Dampak pandemi Covid-19 juga turut serta mengakibatkan penurunan aktivitas melaut yang berpengaruh pada hasil tangkapan para nelayan;
- Masih terbatasnya teknologi penangkapan nelayan

PERIKANAN TANGKAP

Tabel Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pada Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karimun	73.693	73.754	69.442	61.174	52.521	11.721
2	Blintan	51.870	51.973	50.279	56.315	47.702	57.131
3	Natuna	81.382	81.390	81.991	104.879	120.589	132633
4	Lingga	33.647	33.643	33.602	44.137	34.265	35.966
6	Kep Anambas	28.788	28.785	30.875	28.775	21.119	24.030
7	Batam	32.671	32.801	34.973	60.662	38.397	38.513
8	Tanjungpinang	1.360	1.898	3.059	10.640	17.583	2.669
	JUMLAH	303.411	304.244	304.221	366.582	332.176	302.663

Jumlah produksi perikanan tangkap dengan target sebesar 306.463,67 Ton di tahun 2021 terealisasi sebesar 302.662,78 ton dengan presentase 98,76% atau dalam kategori kinerja sangat tinggi. Demikian pula dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang melebihi target sebesar 110,57 di tahun 2021 terealisasi sebesar 112,67 atau 101,9% atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi.

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar
Perikanan Tahun 2020 – 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		PENINGKATAN/ PENURUNAN (%)
		2020	2021	
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,56	112,67	8,09%

PERIKANAN BUDIDAYA

Provinsi Kepri yang memiliki laut seluas 24.121.530,0 ha (95,79%) dan daratan seluas 1.059.511,0 ha (4,21%) menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya (akuakultur) yang sangat besar, terutama budidaya laut (marikultur). Di Provinsi ini diperkirakan terdapat sekitar 455.779,9 ha areal laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 ha untuk marikultur pesisir (coastal marine culture) dan 401.107,9 ha untuk marikultur lepas pantai (offshore marine culture) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota

Daerah tingkat II yang memiliki potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.054 ha untuk coastal marine culture dan sekitar 226.538 ha untuk offshore marine culture. Komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kepri mencakup ikan air laut, rumput laut, ikan dan udang air payau, dan ikan air tawar.



Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah Jumlah hasil budidaya ikan terdiri dari budidaya ikan laut termasuk budidaya rumput laut, ikan air tawar dan ikan budidaya di air payau baik yang dilakukan perorangan maupun Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Provinsi Kepri.

PERIKANAN BUDIDAYA

Pencacahan produksi perikanan budidaya dilakukan oleh petugas statistik Kabupaten/Kota dengan metode pengumpulan data statistik perikanan budidaya. Evaluasi terhadap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil ikan budidaya yang di panen dicatat/dicacah oleh petugas statistik perikanan budidaya/eunerator maupun perhitungan secara estimasi di desa sampel di Kab/Kota Data di atas dikompilasi dan divalidasi oleh petugas.

Terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya sebesar 21,421.10 ton dan di tahun 2020 produksi mengalami peningkatan menjadi 22.339 ton atau naik sebesar 0,04%. Kesadaran masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi untuk menjaga kondisi tubuh selama pandemi Covid-19 mampu mendongkrak capaian angka konsumsi ikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel Potensi Perikanan Budidaya di Propinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN/ KOTA	LUAS DARATAN (ha)	PANJANG GARIS PANTAI (km)	BUDIDAYA DI LAUT (ha)		BUDIDAYA DI DARAT (ha)	
			PESISIR	LAUT LEPAS	AIR PAYAU	AIR TAWAR
Batam	211.772	172	10.710	50.422	288	150
Bintan	194.613	435	6.684	37.517	250	389
Karimun	287.320	642	10.211	47.232	190	65
Natuna	205.845	460	6.021	20.393	507	22
Anambas	59.014	132	1.993	19.005	0	50
Lingga	23.920	473	19.054	226.538	828	83
Tanjungpinang	77.027	53	0	0	0	60
Jumlah	1.059.511	2.368	54.672	401.108	2.063	819
Luas Laut	24.121.530		455.780			

PERIKANAN BUDIDAYA

Terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya sebesar 21.421,10 ton dan di tahun 2021 produksi mengalami peningkatan menjadi 22.339 ton atau naik sebesar 0,04%. Kesadaran masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi untuk menjaga kondisi tubuh selama pandemi Covid-19 mampu mendorong capaian angka konsumsi ikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Se-Kabupaten Kota Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 -2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021
1	Karimun	2.573,03	2.050
2	Bintan	5.287,78	3.527
3	Natuna	3.727,80	4.365
4	Lingga	52,49	50
6	Kep Anambas	419,33	184
7	Batam	9.241,87	11.866
8	Tanjungpinang	118,80	297
	JUMLAH	21.421,10	22.399

Demikian pula indikator Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) dirilis oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menghitung angka kesejahteraan pembudidaya ikan. Hasil evaluasi terhadap Nilai Tukar Nelayan (NTPi) dengan target sebesar 108,47 di tahun 2021 terealisasi sebesar 97,7 atau 90,07% atau dalam kategori tinggi

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2020 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		PENINGKATAN/ PENURUNAN (%)
		2020	2021	
1	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	101,63	97,7	0,04%

PERIKANAN BUDIDAYA

Penurunan nilai tukar pembudidaya ikan tersebut menunjukkan bahwa masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 tahun 2021 masih berpengaruh terhadap produksi perikanan budidaya di 5 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau sehingga juga berdampak secara rata-rata terhadap penghasilan pembudidaya ikan.

Jumlah produksi olahan adalah volume produk olahan hasil perikanan yang terdiri dari volume produksi olahan unit pengolahan ikan (UPI) skala besar di tambah volume produksi olahan UPI skala UMKM Data capaian dihitung triwulanan/akhir tahun.

Jumlah produksi hasil olahan perikanan Propinsi Kepri jauh melebihi yang ditargetkan, yaitu dari target sebesar 1.331,54 Ton di tahun 2021 terealisasi sebesar 14.914,39 Ton atau 1120,09 % atau dalam kategori kinerja sangat tinggi.

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		PENINGKATAN/ PENURUNAN (%)
		2020	2021	
1	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)	6.205,90	14.914,39	0,04%



PERIKANAN BUDIDAYA



PENEBARAN BENIH IKAN KAKAP PUTIH



**GUBERNUR ANSAR AHMAD, PANEN RUMPUT LAUT
KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT DI PULAU
JAGA KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN**





20
22

PROFIL SOSIAL DEMOGRAFI

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



SOSIAL DEMOGRAFI

Angka Indeks
Pembangunan Manusia
Kepri pada tahun 2021
sebesar 75,79
mengalami kenaikan
0,40 poin dibandingkan
tahun 2020

Jumlah penduduk
miskin mengalami
kenaikan, yaitu dari
131,97 ribu jiwa di
tahun 2020 menjadi
144,46 ribu jiwa di
tahun 2021



Angka Indeks
Pembangunan Manusia
Kepri pada tahun 2021
sebesar 75,79
mengalami kenaikan
0,40 poin dibandingkan
tahun 2020

Jumlah penduduk
Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2021
berjumlah 2.118,239
jiwa atau 0,78 % dari
populasi penduduk
Indonesia.

SOSIAL DEMOGRAFI

Populasi

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 2.118.239 jiwa yang terdiri atas 1.080.717 jiwa penduduk laki-laki dan 1.037.522 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,16 ini berarti diantara 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Batam sebesar 58,07 persen. Sedangkan Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 258,27 penduduk per km², dimana wilayah yang terpadat berada di Kota Tanjungpinang sebesar 1.614,33 penduduk per km².

Umur dan Jenis Kelamin

Menurut Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 2.064.564 jiwa, terdiri dari 1.011.268 perempuan dan 1.053.296 laki-laki. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 2.118.239 jiwa, terdiri dari 1.037.522 perempuan dan 1.080.717 laki-laki. Struktur umur penduduk Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk muda dan penduduk umur 30-34 tahun. Frekuensi terbesar penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 5-9 tahun. Sedangkan frekuensi terbesar penduduk perempuan berada pada kelompok umur 30-34 tahun.

SOSIAL DEMOGRAFI



Gambar Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kepulauan Riau, 2015*-2021 (Sumber: BPS Kepri)

Rasio jenis kelamin tahun 2021 sebesar 104,16 artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 s.d 2021, rasio jenis kelamin lebih besar dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021; diolah

Gambar Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Laju pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020, dimana IPM paling tinggi berada di wilayah Kabupaten Lingga dan IPM Provinsi Kepulauan Riau memiliki IPM lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional.

PERKEMBANGAN KESEHATAN DIMASA PANDEMI



RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI COVID-19 PULAU GALANG

KESEHATAN

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan bencana, adapun potensi bahaya kerawanan bencana di bagian kesehatan yakni sebagai berikut :

Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit di Provinsi Kepulauan Riau

Potensi bahaya epidemik dan wabah penyakit memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana epidemik dan wabah penyakit berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Di Provinsi Kepulauan Riau, potensi luas bahaya epidemik dan wabah penyakit secara keseluruhan adalah 798.499,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap pandemic covid-19. Hal ini disebabkan karena letak Provinsi Kepulauan Riau yang sangat strategis dan berdekatan dengan negara tetangga seperti (Singapura dan Malaysia) serta menjadi negara kunjungan wisata manca negara yang sangat potensial.

Wilayah yang memiliki bahaya pandemic tertinggi terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.711	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	128.705	Tinggi
3	Kota Batam	96.958	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	89.528	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	214.051	Sedang
6	Kabupaten Natuna	195.646	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	58.900	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		798.499	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Tabel Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit

Dari tabel 1. di atas menunjukkan adanya Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit yang terjadi Provinsi Kepulauan Riau dimana kategori bahaya yang dimiliki terdapat 2 (dua) kelas yaitu Kelas Tinggi dan Kelas Sedang. Adapun bahaya kelas tinggi di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun. Dan bahaya kelas sedang terdiri dari Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas.

KESEHATAN

Tabel 2. di atas menunjukkan Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana bahaya yang terjadi terdiri dari 3 (tiga) kelas yakni kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. Bahaya kelas rendah terdapat di wilayah Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Tingkat bahaya kelas sedang terdapat di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. Dan bahaya kelas tinggi terdapat di wilayah Kota Batam. Hal ini terjadi karena Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Sehingga menjadi pusat perhatian dari berbagai negara yang memungkinkan banyak wisatawan pada masuk ke Kota Batam.

Percepatan Penanganan Covid

Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau sudah melewati 2 tahun, sejak kasus pertama konfirmasi positif COVID-19 di Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 Maret 2020. Kondisi perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau hingga tanggal 13 September masih terdapat penambahan kasus

dimana terdapat 53.103 kasus terkonfirmasi, 550 kasus aktif dan 50.843 kesembuhan.

Provinsi Kepulauan Riau sempat berada pada kategori daerah Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, namun dengan determinasi dan integritas untuk menekan penyebaran COVID-19 melalui penelusuran dan vaksinasi akhirnya Provinsi Kepulauan Riau dapat mengurangi jumlah kasus harian terkonfirmasi dan pada saat ini Provinsi Kepulauan Riau sudah berada dalam status (PPKM) Level 3 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021.

Percepatan Vaksinasi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kecepatan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang totalnya lebih kurang 15.000 orang yang telah menerima program vaksinasi. Ucapan itu disampaikan Presiden secara virtual saat melakukan peninjauan lokasi vaksinasi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

KESEHATAN

DERAJAT KESEHATAN

Menurut UU RI No. 23 tahun 1992, yang dimaksud dengan keadaan sehat adalah keadaan meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas penyakit, cacat, dan kelemahan sehingga dapat hidup produktif secara sosial ekonomi. Beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan derajat kesehatan adalah: lingkungan, pelayanan kesehatan dan perilaku.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah ditandai dengan menurunnya jumlah angka kematian bayi dan ibu hamil, naiknya status gizi masyarakat Indonesia, dan angka harapan hidup yang semakin bertambah.

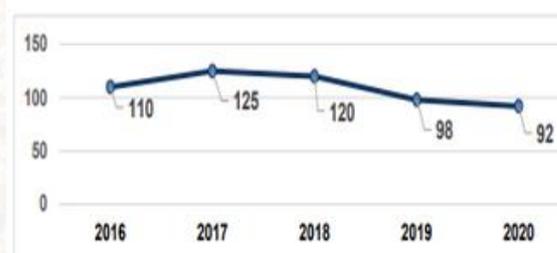
Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suatu daerah adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Umur Harapan Hidup (UHH) dan Status Gizi. Indikator tersebut ditentukan dengan 4 faktor utama yaitu Perilaku Masyarakat, Lingkungan, Pelayanan Kesehatan dan Faktor Genetika.

Angka Kematian

Mortalitas atau kematian adalah merupakan keadaan hilangnya semua tanda - tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (World Health Organization). Kematian dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan saja dan dimana saja

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

AKI di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 berdasarkan data yang ada sebesar 92 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini termasuk dalam kategori baik karena sudah mencapai target AKI pada renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu dibawah 129 per 100.000 kelahiran hidup. AKI tahun 2020 lebih rendah (lebih baik) jika dibandingkan dengan AKI tahun 2019 yang sebesar 98 per 100.000 kelahiran hidup. (dilihat gambar 1.)



Gambar Angka Kematian ibu Tahun 2016-2020

KESEHATAN

Berdasarkan kematian ibu yang dilaporkan, Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yaitu sebesar 92 per 100.000 KH (38 kematian Ibu/41.292 kelahiran hidup dikali konstanta 100.000). Capaian AKI Tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan AKI pada tahun 2019 yang sebesar 98 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu, juga terdapat penurunan dari 41 kasus kematian ibu di Tahun 2019, turun menjadi 38 kasus di Tahun 2020.

No	Kabupaten/ Kota	Kematian Ibu Tahun 2019		Kematian Ibu Tahun 2020		Target AKI Renstra Dinkes Kepri 2020
		Jumlah Kematian	AKI	Jumlah Kematian	AKI	
1	Karimun	3	79,94	5	138,35	129 per 100.000 kelahiran hidup
2	Bintan	5	172,59	5	174,89	
3	Natuna	1	78,99	2	146,95	
4	Lingga	2	148,81	3	222,72	
5	Kep. Anambas	2	243,61	1	114,81	
6	Batam	23	82,72	18	65,41	
7	Tanjungpinang	5	130,86	4	107,47	
	Provinsi Kepulauan Riau	41	98,30 (dibulatkan menjadi 98)	38	92,03 (dibulatkan menjadi 92)	

Jika dilihat berdasarkan data kabupaten/kota dapat diketahui bahwa ada 4 kabupaten/kota dengan AKI yang tidak mencapai target renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (129 per 100.000 kelahiran hidup) yaitu Kabupaten Lingga, Bintan, Natuna, dan Karimun. Dilihat dari jumlah kasus yang ada, diketahui bahwa Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga mengalami peningkatan jumlah kematian ibu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 masih didominasi oleh penyebab langsung yaitu pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, persentase penyebab lainnya yang merupakan penyebab tidak langsung juga cukup besar, contohnya kondisi penyakit malaria, HIV, edema paru (suatu kondisi yang ditandai dengan gejala sulit bernapas akibat terjadinya penumpukan cairan di dalam kantong paru-paru) (alveoli), gagal ginjal, batu empedu atau penyakit lain yang diderita ibu.

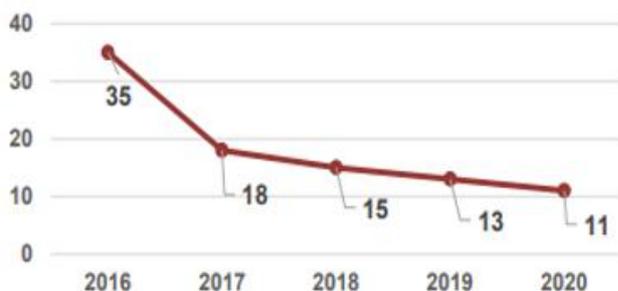
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

AKI di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 berdasarkan data yang ada sebesar 92 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini termasuk dalam kategori baik karena sudah mencapai target AKI pada renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu dibawah 129 per 100.000 kelahiran hidup. AKI tahun 2020 lebih rendah (lebih baik) jika dibandingkan dengan AKI tahun 2019 yang sebesar 98 per 100.000 kelahiran hidup. (dilihat gambar 1.)

KESEHATAN

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH

AKB adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.. AKB mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat.



Gambar Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2020

Secara absolut, jumlah kematian bayi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah kematian bayi di Provinsi Kepulauan Riau terus menurun (lihat Gambar 5). Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan dari pelayanan kesehatan diketahui AKB di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 ialah sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka ini bisa dikatakan sangat rendah jika dibandingkan dengan data AKB hasil survei seperti data AKB Nasional berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 yaitu sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup dan data AKB Nasional berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 yaitu sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup.

Hal ini dapat dimungkinkan oleh karena terdapat kasus kematian bayi yang belum atau tidak dilaporkan karena berbagai macam sebab antara lain faktor budaya etnis tertentu. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk menghitung estimasi AKB sebesar dua kali lipat dari AKB yang dilaporkan oleh pelayanan kesehatan dan ditetapkan AKB estimasi tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup, dengan perhitungan ($229 \text{ kematian bayi} / 41.292 \text{ kelahiran hidup} \text{ dikali } 1.000 \text{ dikali } 2$).

KESEHATAN

Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKB di Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Adanya pembiayaan Jampersal, serta Peningkatan pelayanan ANC (Antenatal Care/pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil),
2. Ketersediaan SDM yang berkompeten, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di puskesmas pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang melibatkan lintas-sektor,
3. Membaiknya sistem rujukan di beberapa kabupaten/kota, dan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang rutin setiap tahunnya. AMP merupakan kegiatan yang menelusuri kembali sebab kesakitan dan kematian ibu dan bayi dengan tujuan mencegah kesakitan dan kematian yang akan datang serta dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jika dibandingkan dengan target AKB pada renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (31 per 1.000 kelahiran hidup), AKB estimasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 termasuk dalam kategori baik. Selain itu jumlah kematian bayi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 272 kasus menjadi 229 kasus kematian bayi.

Berdasarkan data kabupaten/kota dapat diketahui bahwa kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah kematian bayi dan AKB jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas. Distribusi Kematian Bayi dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel Distribusi Kematian Bayi di Provinsi Kepri Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Kematian Bayi Tahun 2019		Kematian Bayi Tahun 2020		Target AKB Renstra Dinkes Kepri 2020
		Jumlah Kematian	AKB	Jumlah Kematian	AKB	
1	Karimun	54	14,39	47	13,00	31 per 1.000 kelahiran hidup
2	Bintan	29	10,01	14	4,90	
3	Natuna	23	18,17	17	12,49	
4	Lingga	25	18,60	19	14,11	
5	Kep. Anambas	8	9,74	9	10,33	
6	Batam	110	3,96	106	3,85	
7	Tanjungpinang	23	6,02	17	4,57	
	Provinsi Kepulauan Riau	272	6,52 (diestimasi menjadi 13)	229	5,55 (diestimasi menjadi 11)	

KESEHATAN

Penyebab terbesar kematian bayi pada tahun 2020 adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (post neonatal) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna, dan diare. Kematian neonatal banyak disebabkan akibat adanya gangguan fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan tubuh (asfiksia) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal).

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator/penilaian derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Indikator AHH juga merupakan salah satu komponen dalam penilaian keberhasilan pencapaian MDG's.

Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia didunia. Didasarkan pada perkiraan CIA World Factbook pada tahun 2011, Indonesia berada pada nomor urut 108 berdasarkan daftar PBB dari 191 Negara yang dipublikasikan di Wikipedia, dengan angka harapan hidup 70,76 (laki-laki 68,26 dan perempuan 73,38).

Angka Harapan Hidup yang semakin meningkat merupakan indikator semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor Lingkungan, Pelayanan Kesehatan, Keturunan dan Perilaku masyarakat.

KESEHATAN

Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator kesehatan penting yang digunakan dalam penilaian status kesehatan masyarakat. Gizi yang baik merupakan landasan kesehatan, gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Indikator underweight pada balita diukur dengan rumus perhitungan yaitu jumlah anak usia 0-59 Bulan 29 hari dengan status gizi kurus (BB/PB atau $BB/TB - 3 SD$ s.d. $< 2 SD$) / Jumlah anak usia 0-59 Bulan 29 hari yang dikonfirmasi status gizinya pada periode dan wilayah tertentu x 100%.

Setiap tahun terjadi penurunan kasus yang signifikan, terlihat dengan perbandingan persentase balita underweight Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 – 2020. Tahun 2016, persentase underweight sebesar 17,1%, lalu menurun di tahun 2017 menjadi 16,4%, pada tahun 2018 menurun menjadi 13%, Tahun 2017 menurun menjadi 16,4% dan Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 5,6%.



Gambar Tren penurunan persentase underweight di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan penurunan kasus underweight di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kinerja dari berbagai pihak. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan RS, bersama lintas sektor terkait telah menjalin komitmen untuk menanggulangi kasus permasalahan gizi yang ditemukan di masyarakat

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam penurunan balita dengan status kekurangan gizi, yaitu dengan melakukan monitoring pelacakan dan konfirmasi masalah gizi di Kabupaten/Kota. Hasil temuan dari pelacakan gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau secara umum disebabkan pola asuh, penyakit penyerta dan tingkat perekonomian rendah.

KESEHATAN

Untuk menekan jumlah kasus balita dengan kekurangan gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya - upaya sebagai berikut:

- Penanganan kasus gizi buruk menggunakan prosedur tetap (SOP) tatalaksana asuhan gizi baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
- Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita masih sangat diperlukan terutama di daerah - daerah hinterland dan terpencil.
- Pola asuh menjadi penyebab utama kejadian gizi buruk pada Balita. Pola Asuh berkaitan dengan cara pemberian makanan sehari-hari. Anak akan bertumbuh kembang dengan baik jika mendapatkan pola asuh yang baik.

Berdasarkan tabel 5. di atas diketahui bahwa dari indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Indikator Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tercapai sebesar 5,6% dari target 16,5% sehingga pencapaian indikator ini masuk pada kategori "sangat baik" dengan nilai persentase kinerja sebesar 166% dan telah melampaui target pada akhir periode RPJMD (2021), dimana pada akhir periode RPJMD 2021 persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ditargetkan sebesar 16,2%, sedangkan pada tahun 2020 telah mencapai angka 5,6%. Diikuti juga dengan dua indikator lainnya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH tercapai dengan kategori "sangat baik".

Tabel Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2018-2021)	Tahun 2020				Tahun 2019	Tahun 2018
			Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	128	131	92	128,66	Sangat Baik	98	120
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	30	33	11	164,22	Sangat Baik	13	33
3	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	16,2	16,5	5,6	166	sangat Baik	11,45	17,1

KESEHATAN

Capaian Kinerja Berdasarkan Strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Riau

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dan Indikator Kinerja Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 KH keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 (satu) baik di 2 (dua) Indikator Kinerja memiliki pencapaian Status "sangat baik".

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2016-2021)	Tahun 2020				Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017
			Target	Capaian	%	Status Capaian			
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	128	131	92	128,66	Sangat Baik	98	120	128
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	30	33	11	164,22	Sangat Baik	13	33	35

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2016-2021)	Tahun 2020				Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017
			Target	Capaian	%	Status Capaian			
1.	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita)	14	16,5	5,6	166	Sangat Baik	11	13	16,4

KESEHATAN

Tabel di atas menunjukkan Indikator persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita yang menjadi pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 memiliki capaian "sangat baik".

Dari tabel di bawah ini diketahui bahwa sasaran 3 yaitu menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular yang harus dicapai melalui 4 indikator sasaran telah mampu dicapai seluruhnya dengan kategori "sangat baik".

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2016-2021)	Tahun 2020				Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017
			Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
1.	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	175	170	164	96,53	Sangat Baik	316	160	193
2.	API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	0,27	0,29	0,09	169	Sangat Baik	0,14	0,33	0,2
3.	Prevalensi HIV	<0,5	<0,5	<0,5	100	Sangat Baik	<0,5	<0,5	<0,5
4.	Prevalensi tekanan darah tinggi	27,9	28,10	25,86	107,97	Sangat Baik	28,2	28,5	22,4

PENANGGULANGAN STUNTING

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan stunting juga menjadi fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Melalui upaya bersama dalam penanganan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, maka diharapkan pada tahun 2026 angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita turun menjadi 12 persen dari awalnya sebesar 19 persen pada tahun 2021. Rincian target penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar

KESEHATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dari penanggulangan stunting terdiri dari beberapa program yaitu

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



Gambar Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita

DIMENSI KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KESEHATAN

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi di antaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut.



Sementara, jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Khusus untuk pendapatan perkapita tidak akan diulas mendalam pada bagian ini karena akan diulas Bidang Ekonomi. Pada bagian ini berfokus pada penduduk miskin.



Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dan isu global. Dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun pada tahun 2030.

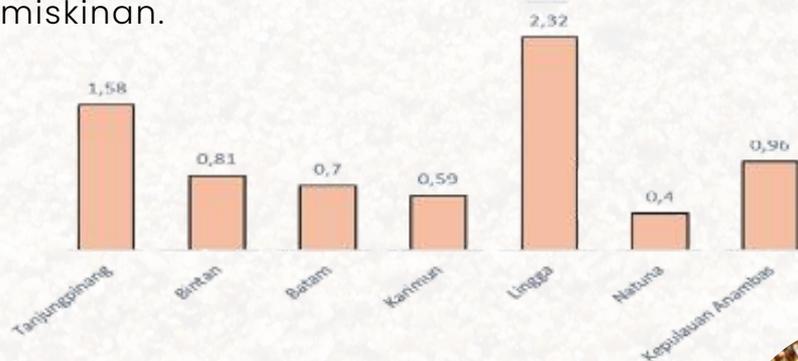
KESEHATAN

Tabel Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2017 – 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			
	2017	2018	2019	2020
Kepri	125,37	131,68	128,46	131,97
Tanjungpinang	19,19	19,30	19,05	19,98
Bintan	9,37	10,42	10,14	10,21
Batam	61,16	67,41	66,21	67,06
Karimun	16,94	15,93	15,36	15,99
Lingga	12,35	12,13	11,56	12,45
Natuna	3,53	3,60	3,43	3,47
Kepulauan Anambas	2,84	2,90	2,72	2,80

Sebaran data penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau

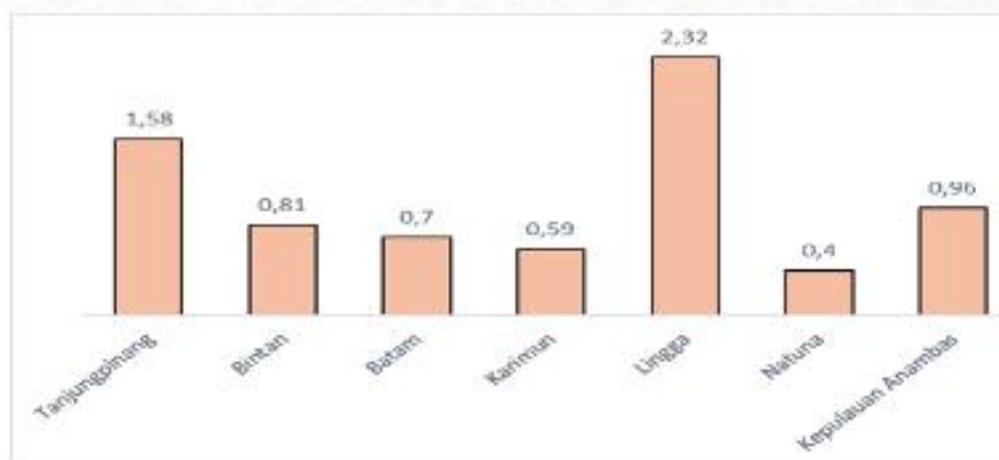
Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (poverty gap index) dan tingkat keparahan (poverty severity index) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

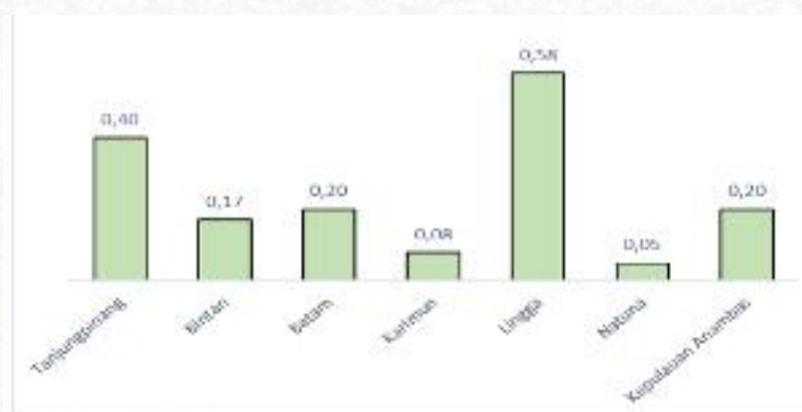
KESEHATAN

Jika kita lihat gambar di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Per Maret 2020 Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks tertinggi dengan nilai 2,32% dan Kabupaten Natuna memiliki nilai indeks terendah dengan nilai 0,4%.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar Indeks Kedalaman Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (PI) (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar Indeks Kedalaman Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (PI) (%)

Gambar di atas menunjukkan Indeks Keperahan Kemiskinan per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data dari BPS maka Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks tertinggi dan nilai indeks terendah terdapat pada Kabupaten Natuna

TINGKAT KETENAGAKERJAAN PROVINSI KEPRI



KETENAGAKERJAAN

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebanyak 1.207.014 penduduk, dimana sebesar 1.087.419 penduduk yang bekerja dan 119.595 penduduk pengangguran. Jika dirinci per Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 yang paling besar berada di Kota Batam sebesar 11,64. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Kepulauan Riau termasuk yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 28.597 orang Dimana jumlah terbanyak terdapat di Kota Batam sebanyak 5.785 orang.



Urusan Tenaga Kerja Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian. Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

KETENAGAKERJAAN

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran jika dibanding keadaan Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2020 sebanyak 1.133.776 mengalami penambahan sebanyak 128.616 orang dibandingkan keadaan 2019. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.016.600, sedangkan yang menganggur sebanyak 117.176 orang.

Keadaan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tabel Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2015	891.988	836.670	93,80	55.318	6,20
2016	931.436	859.813	92,31	71.622	7,69
2017	966.091	896.000	92,74	69.160	7,16
2018	970.132	901.019	92,88	69.113	7,12
2019	1.005.160	935.682	93,09	69.478	6,91
2020	1.133.776	1.016.600	89,66	117.176	10,34

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2015-2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2020 sebanyak 1.133.776 mengalami penambahan sebanyak 128.616 orang dibandingkan keadaan 2019. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.016.600, sedangkan yang menganggur sebanyak 117.176 orang.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PENDIDIKAN

Dasar hukum SPM Bidang Urusan Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Target pencapaian SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 belum ditetapkan, karena belum adanya penganggaran khusus terkait penerapan SPM, namun merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 maka target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Namun demikian, pada tahun 2020 realisasi pencapaian kedua indikator SPM belum mampu memenuhi target tersebut.

Tabel Pencapaian Target APK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK	100%	96,01%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB	100%	82,48%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan masih belum dilakukan secara optimal. Dimana dari dua indikator tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Permendagri No 100 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2026 belum mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga penganggaran kegiatan pendukung SPM secara spesifik belum dapat termuat dalam Dokumen Perencanaan baik RENSTRA maupun RKPD Tahun 2020, walaupun sebenarnya sebagian besar kegiatan yang ada sudah berkesesuaian dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, belum adanya Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

PENDIDIKAN

Capaian Kinerja Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu:

1. pengelolaan pendidikan menengah;
2. pengelolaan pendidikan khusus;
3. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
4. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
5. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Kinerja indikator program pembangunan pendidikan pada pendidikan provinsi kepulauan riau ditunjukkan pada 5 program pembangunan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu.



PENDIDIKAN

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2020). APK dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu.



Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu SMA sederajat. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (Kemendikbud, 2020).

Dari total penduduk usia sekolah (16 – 18 tahun) di Kepulauan Riau yang berjumlah sekitar 89.440 anak,

Berdasarkan data Tahun 2020 Anak Tidak Sekolah di Kepulauan Riau Mencapai 15,38% atau 13,756 anak ada beberapa penyebab Anak Tidak Sekolah : Belum mendapatkan akses layanan pendidikan (Letak Sekolah Lanjutan Jauh dari Tempat Tinggal dan Tidak ada Transportasi), Anak tersebut bekerja atau menjadi pekerja Anak, Anak Penyandang Disabilitas atau anak yang sedang berurusan dengan Hukum.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Negeri dan Swasta

Sementara itu, data Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami fluktuasi meskipun secara keseluruhan di tahun 2020 nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga berlaku sama dengan nilai APS SMA/MA/SMK untuk tahun 2020 dimana nilainya menjadi yang tertinggi selama 6 tahun terakhir.



PENDIDIKAN

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan jaman. Guru merupakan bagian penting dalam pendidikan, sehingga perannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan. Sebagai pelaksana pendidikan, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan kompetensi akademik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Capaian indikator terkait tenaga kependidikan dan mutu pendidikan yang juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) dan Lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, persentase guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau dengan kualifikasi S1/D4 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, indikator ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 95,63 persen guru sekolah menengah memiliki ijazah S1 sederajat.

Persentase guru yang sudah sertifikasi setiap tahun memang meningkat, namun peningkatannya sangat kecil. Hal ini dikarenakan hanya sedikit guru yang bisa dilatih untuk mengikuti TPG setiap tahunnya karena program ini dari pusat dan sudah dialokasikan kuotanya untuk masing-masing kabupaten/kota. Tahun 2020 baru sekitar 39,09 persen guru SMA/SMK/SLB yang sudah sertifikasi. Sedangkan, untuk persentase kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan juga telah mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2016 ada 58 persen, meningkat menjadi 65,30 persen pada tahun 2018, kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 62,00 persen dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 65,54 persen.



PENDIDIKAN

Peningkatan Mutu Pendidikan Kualitas pendidikan

Kompetensi lulusan SMK diukur dari persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha dan persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non akademik (minat, bakat, prestasi). Kompetensi lulusan SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau. Lulusan SMA yang diterima di PT meningkat setiap tahunnya, mulai tahun 2016 diterima sebanyak 15 persen dari siswa yang tamat, kemudian meningkat menjadi 58,50 persen pada tahun 2020. Peningkatan kompetensi lulusan juga pada lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha. Tahun 2016 meskipun baru mencapai 15 persen.



Namun meningkat jauh pada tahun 2017 yaitu sebesar 50 persen dan di tahun 2020 mencapai 60,1 persen. Meski demikian, kompetensi lulusan SMK masih perlu ditingkatkan lagi supaya lulusan SMK ini dapat lebih diterima lagi di dunia industri atau dapat berwirausaha. Berdasarkan Data Tahun 2020 Jumlah Siswa SMK yang tidak diterima di DU/DI Dunia Usaha/Dunia Industri sebesar 39,91% atau 3,961 Siswa dari Total 9.925 Siswa Lulusan SMK, Di Tahun 2020 pandemi Covid 19 melanda Indonesia ini tentunya berpengaruh pada Perekonomian Indonesia, banyak perusahaan perusahaan besar maupun kecil yang terpaksa menutup usahanya, Kota Batam sebagai pusat perekonomian Kepulauan Riau pun ikut terdampak, tentunya hal ini berpengaruh pada lulusan PT maupun menengah untuk mencari pekerjaan Sementara itu, untuk indikator persentase Peserta Didik yang memiliki Kompetensi non-Akademik (minat, bakat dan prestasi) cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 meskipun di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan untuk tahun 2019.

PENDIDIKAN

Peningkatan Mutu Pendidikan Kualitas Pendidikan



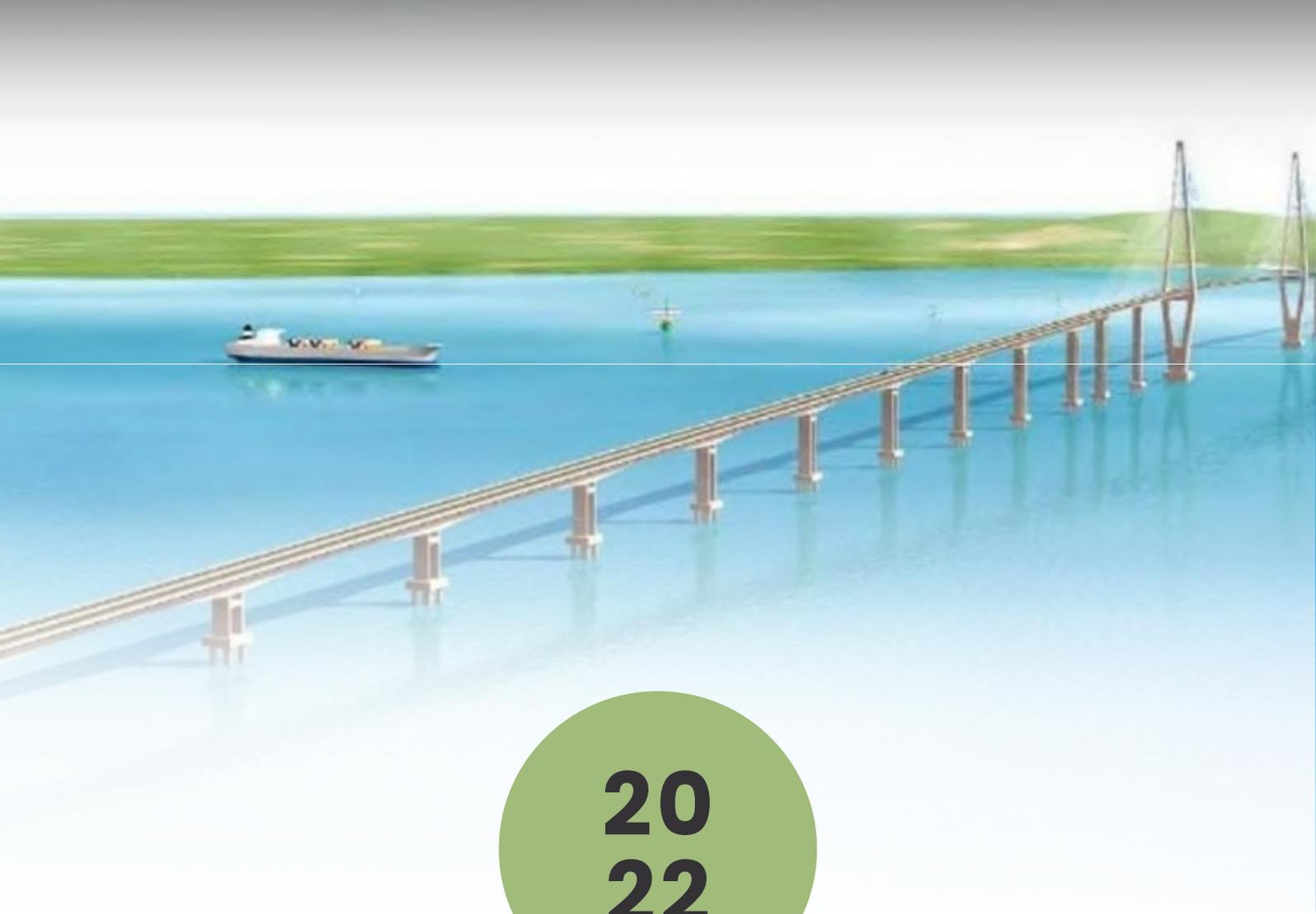
Penurunan yang signifikan terjadi di tahun 2019 dimana ditargetkan 37% dan hanya terealisasi sebesar 8,27%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2019 Dinas Pendidikan mengirimkan 145 peserta untuk mengikuti Lomba di tingkat Nasional untuk semua cabang lomba dari Jenjang SMA/SMK dan SLB, dari 145 peserta yang dikirim hanya 12 peserta yang mampu meraih peringkat 1,2 dan 3. Hal ini berdampak pada persentase kinerja yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 capaiannya sebesar 42,00 persen. Belum mampunya siswa SMA/SMK/SLB yang ada di Kepri bersaing dalam lomba tingkat nasional secara optimal disebabkan beberapa hal: di antaranya adalah Besarnya biaya pelatihan yang dibutuhkan oleh siswa dalam latihan praktek untuk persiapan lomba sehingga pelatihan yang disiapkan tidak maksimal hanya dilakukan beberapa hari menjelang hari perlombaan, kekurangan sarana prasarana dan tidak sesuainya alat praktek yang dimiliki sekolah dengan alat praktek yang dimiliki tim pusat untuk perlombaan juga menjadi penyebab rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti perlombaan.

PENDIDIKAN

Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi



Di samping layanan yang dilakukan Dinas Pendidikan secara umum juga ada layanan yang dilakukan dengan tujuan mencapai kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi informasi yang difokuskan pada Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi yang dimiliki Dinas Pendidikan. Layanan berupa siaran televisi pendidikan dan pelatihan guru dan siswa yang berbasis teknologi informasi. Walaupun dalam pengembangan Baltekkomdik ini terkendala dengan dana, namun sumber daya di Balai Tekkomdik ini terus berusaha untuk memajukan kualitas pendidikan melalui jaringan telekomunikasi dan informasi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator yang Baltekkomdik yang meningkat setiap tahun walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 memang terjadi defisit besar-besaran sehingga capaian indikatornya menurun drastis dari 63,35% pada tahun 2017 menjadi 28,57% di tahun 2018, tahun 2019 mencapai 71,14% dan pada tahun 2020 menjadi 78%.



20
22

PROYEK STRATEGI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



2021

PROYEK STRATEGIS

PROVINSI
KEPULAUAN
RIAU



Dalam rangka menghela Pertumbuhan Ekonomi Kepri untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, Pemerintah perlu membangun sarana infrastruktur yang berkualitas dan merata guna meningkatkan gairah investasi baik domestik maupun asing serta menciptakan lapangan kerja, maka Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan dan mengusulkan pembangunan beberapa **Proyek Strategis Kepri** kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, antara lain

- Pelabuhan Batam - Bintan
- KEK Tanjung Sauh
- KEK Pulau Asam
- KEK Galang Batang
- Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar

- LRT
- Bandara BAI
- Nongsa Park
- Pelabuhan Batu Ampar



PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAM BINTAN

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan merupakan upaya Kepri dalam meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka peluang investasi baru di Pulau Bintan., dan mengurangi biaya logistik antara Pulau Bintan dan Pulau Batam. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan orang, barang, dan jasa antara Pulau Batam dan Bintan. Serta pemerataan perekonomian antara dua pulau, menjadi akses penyaluran air baku, listrik, gas, dan jaringan utilitas lainnya.



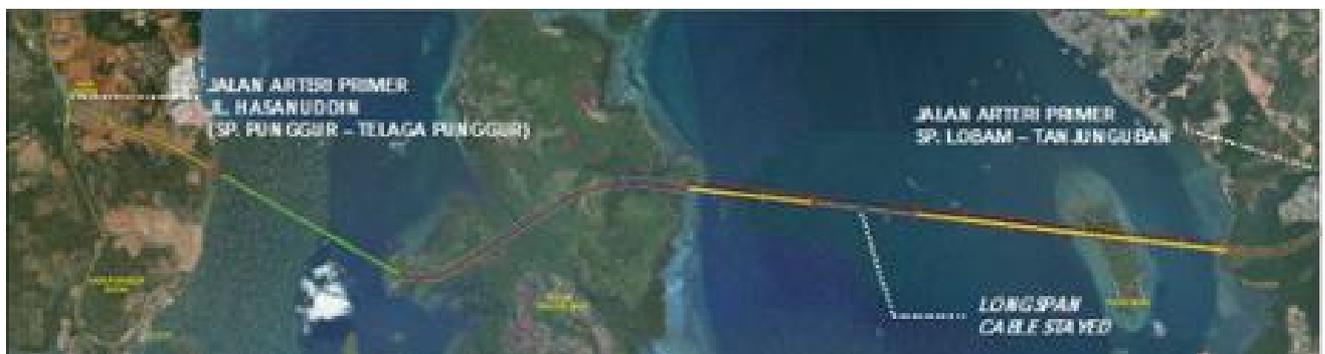
**JEMBATAN
BATAM-BINTAN
(BABIN) ANGKAT
POTENSI
KEPULAUAN RIAU**

Dukungan Pemerintah Jembatan Batam-Bintan yang meliputi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi untuk Jembatan Batam-Tanjung Sauh dan akses jalan dengan total panjang kurang lebih 6.764 km.
Rencana Kecepatan: 80 km/jam Lebar Lajur: 3,6 m Lebar Bahu Luar: 3,0 m Lebar Bahu Dalam: 1,5 m Lebar Median (termasuk bahu dalam): 4,0 m Jumlah Junction: 2 (Batam dan Bintan) Jumlah Interchange: 1 (Tanjung Sauh) Bentang Jembatan Cable Stayed: 500 m pada alur pelayaran Vertical Clearence: 60 m pada alur pelayaran Lalu Lintas Awal: (2024)harian: 8106 (termasuk motor). Panjang jalan 14,753 KM.

PERBESAR
KEMUDAHAN
INDEKS
INVESTASI

PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAM BINTAN

Sistem jembatan Batam-Bintan akan dibagi menjadi dua jembatan, dengan total panjang tujuh ribu meter. Jembatan pertama berukuran panjang dua ribu meter akan menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau TanjungSauh, sedangkan jembatan kedua berukuran panjang lima ribu meter akan menghubungkan Pulau TanjungSauh dengan Pulau Bintan.

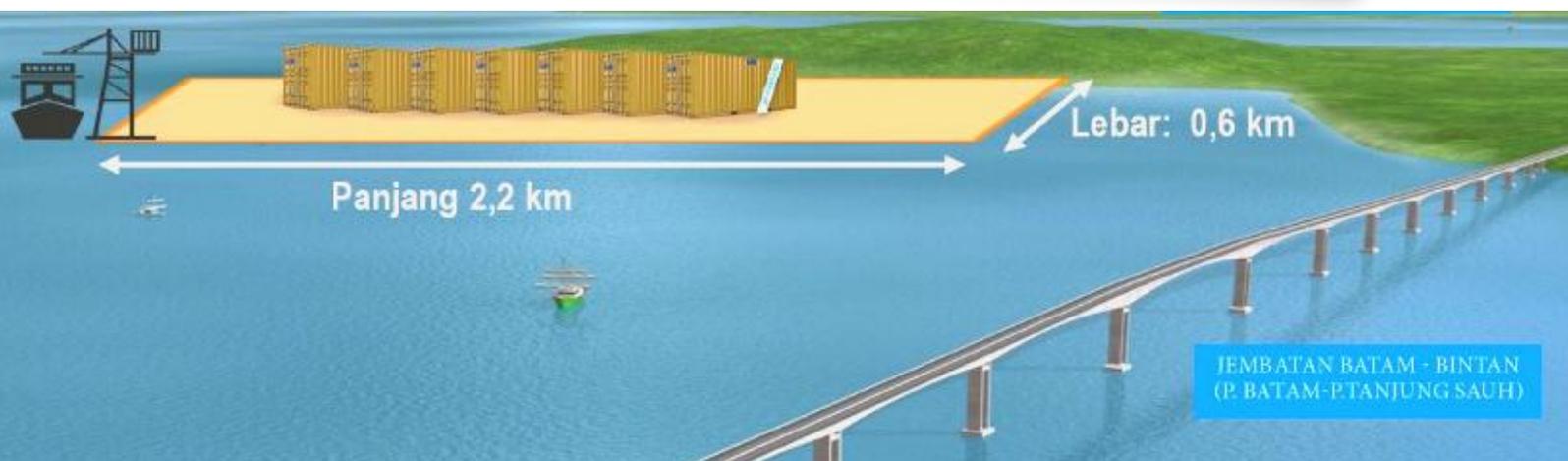


Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan tersebut adalah Rp13,66 triliun (sekitar US\$938 juta), yang disediakan di bawah skema pembiayaan bersama pemerintah-perusahaan.



KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

TG. SAUH



RENCANA PENGEMBANGAN PULAU TANJUNG SAUH SEBAGAI PUSAT EKONOMI BARU DI BATAM TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI TREN EKONOMI MAKRO DI REGIONAL DAN DOMESTIK. KEBERADAAN TANJUNG SAUH DI PERSIMPINGAN JALUR PELAYARAN LOGISTIK GLOBAL DAN DOMESTIK SECARA LANGSUNG MEMBERIKAN DAMPAK

PROYEK BANDARA DAN AEROSPACE INDUSTRY PARK



Pada 24 Januari 2018, PT Bintang Aviation Investments (BAI) memperoleh keputusan penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan terkait pengajuan bandara di Bintan menjadi bandara untuk penggunaan umum. Pembangunan Bandara Internasional Bintan Baru atau New Internasional Airport Bintan sudah berjalan sejak tahun 2015. PT Bintang Aviation Investments membangun proyek bandara dan aerospace industry park dengan luas lahan kawasan bandara 800 hektare (ha) dan kawasan industri 510 ha di Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

Kawasan bandara tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai penerbangan umum, fasilitas pemeliharaan pesawat, dan pusat logistik. Saat ini pembangunan fase 1 sudah masuk tahap pemadatan tanah untuk runway sepanjang 3.000 meter. keberadaan bandara baru tersebut akan mendukung tumbuhnya sektor industri dan pariwisata yang dapat mendatangkan investasi.



BATAM AERO TECHNIC (BAT)



KEK MRO Batam Aero Technic (BAT) dtelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2021. Rencana investasi sampai tahun 2030 sebesar Rp6,2 triliun. Jumlah tenaga kerja yang akan diserap 9.976 orang sampai tahun 2030. KEK ini diharapkan dapat menghemat devisa sebesar 65%-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp26 triliun per tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri.

Dalam jangka menengah diharapkan mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12 ribu unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US\$100 miliar pada 2025.

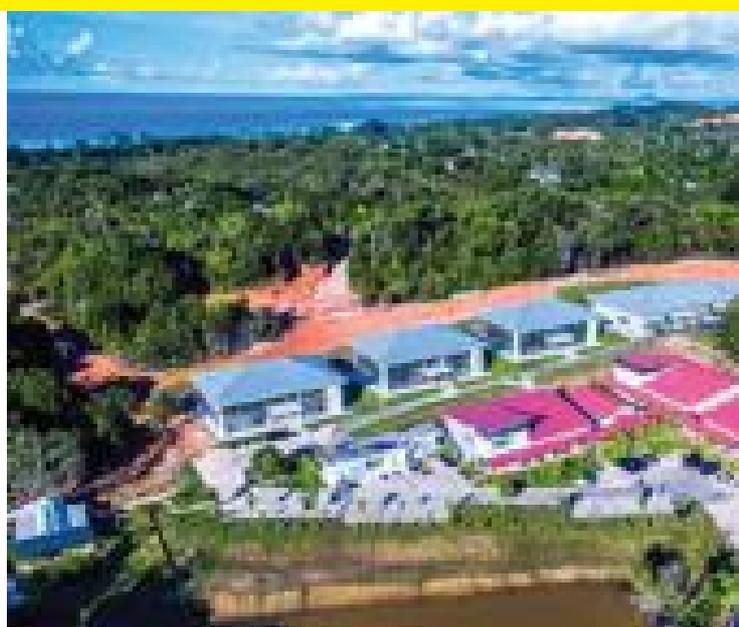
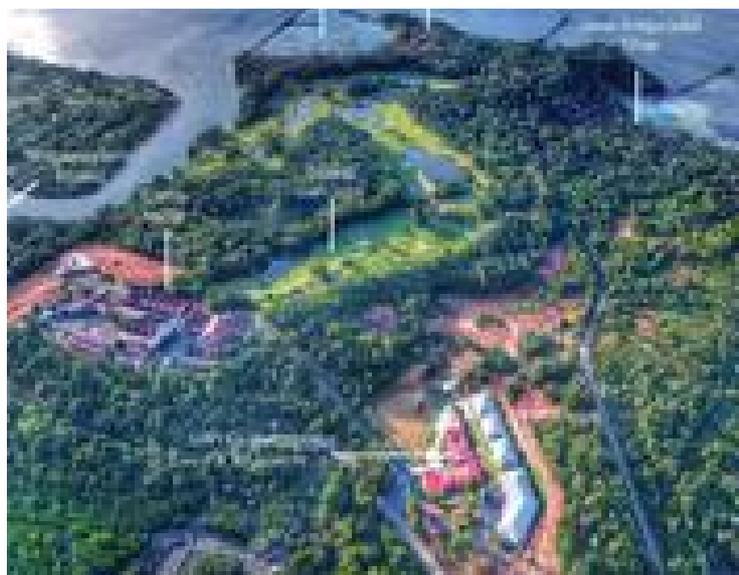


NONGSA DIGITAL PARK

KEK Nongsa Digital Park telah ditetapkan melalui PP Nomor 68 Tahun 2021 Kegiatan utama KEK ini adalah Digital Park dan Pariwisata. Luas lahan mencapai 166,45 hektar. Total investasi mencapai Rp16 triliun terdiri dari Rp1,092 Triliun untuk pembangunan kawasan dan Rp14,908 Triliun untuk investasi tenant. Total tenaga kerja yang sudah terserap sebanyak 1.395 orang dari target 16.500 orang.

TECHNO PRENEUR

Digital Park, Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29466



Nongsa Digital Park telah ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura dan Mancanegara. Keberadaan KEK ini dapat menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp 20-30 Triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan Pendidikan Internasional. Akan menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia menjadi technopreneur.

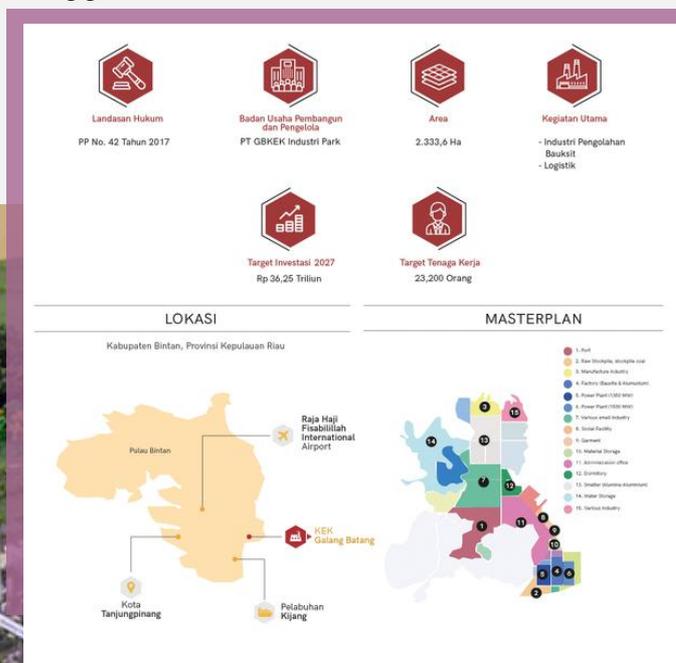
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

GALANG BATANG

BERADA DI PULAU BINTAN KEPULAUAN RIAU, YANG MERUPAKAN SENTRA CHOKE POINT SELAT MALAKA, BERDEKATAN DENGAN BATAM FREE TRADE ZONE DAN SELAT PHILIP.

KEK Galang Batang diusulkan oleh badan usaha PT GBKEK Industri Park dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, dan diresmikan beroperasinya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Darmin Nasution pada tanggal 8 Desember 2018.

KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. Diperkirakan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang, tersebar untuk industri pengolahan refinery sebesar 350 orang, industri pengolahan smelter sebesar 260 orang dan jasa dermaga serta pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan ikutan (multiplier effect) di kawasan tersebut. Adapun nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang adalah sebesar Rp 36,25 Triliun hingga tahun 2027.





KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

PULAU ASAM

Dibandingkan Malaysia dan Singapura, ketahanan minyak domestik Indonesia hanya berada di level 22 hari, sementara Malaysia 26 hari dan Singapura 90 hari, bahkan terpaut jauh dibandingkan China 90 hari dan Amerika Serikat 260 hari. Untuk meningkatkan cadangan bahan bakar minyak nasional tentunya perlu membangun sarana infrastruktur pendukung salah satunya tanki penyimpanan BBM dan minyak mentah yang modern dan berdaya asing.



Untuk kawasan Asia Tenggara, industri penyimpanan minyak (oil storage) dikuasai oleh Johor dan Singapura dengan total kapasitas mencapai 30 juta cubic meter (com). Indonesia memiliki 10 kilang pengolahan minyak berkapasitas 1.169,1 thousand barrels of oil per calendar day (MBCD), Berdasarkan data Ditjen Migas tahun 2010, jumlah tangki penyimpanan BBM darat milik PT Pertamina dan badan usaha lain mencapai 1611 tangki dengan total kapasitas 5,348 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, 54% terkonsentrasi di Rendahnya jumlah tangki penyimpanan BBM di Indonesia dan fasilitas penyulingan minyak mentah menjadi BBM, menjadi peluang bagi wilayah-wilayah kepulauan untuk dikembangkan menjadi basis penyimpanan BBM untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masa datang dan meningkatkan ketahanan minyak nasional. Salah satunya Pulau Asam di Kabupaten Karimun

STRATEGIS KARENA BERADA PADA PINTU MASK SELAT MALAKA DARI SEBELAH TIMUR JUGA BERBATASAN DENGAN PUSAT BISNIS DAN KEUANGAN ASIA PASIFIK YAKNI SINGAPURA.

Banyak pemangku kepentingan di tingkat nasional, maupun kalangan usaha di kota pulau yang memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan dan pengembangan kepelabuhan di Batam. Ada banyak titik perhatian dalam pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan utama di Batam.

Di antaranya peningkatan infrastruktur dan suprastruktur pendukung, dan pengembangan sistem digital dalam manajerial kepelabuhannya. Data BPS menunjukkan bahwa 50% aktivitas ekspor dan impor

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dilakukan melalui Pelabuhan Batu Ampar. Tujuannya mayoritas ke Singapura (40%), dan sisanya ke Amerika Serikat, Tiongkok, serta beberapa negara lainnya.

Sumber: media indonesia & BP Batam

PENGEMBANGAN PELABUHAN BATU AMPAR

Perkembangan sektor pelabuhan di Batam tidak bisa dilepaskan dari hegemoni industri kepelabuhan di Singapura. Keterbatasan fasilitas pelabuhan dan akses menuju negara tujuan dari pelabuhan Batam menyebabkan barang ekspor dari Batam harus singgah atau tranship terlebih dahulu ke Singapura. Pintu keluar masuk utama barang dari Batam melalui Pelabuhan Batu Ampar yang berada di bawah pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam (BP Batam). BP Batam berencana meningkatkan kapasitas pelabuhan dari 350.000 TEUs kontainer per tahun menjadi 600.000 hingga 1 juta TEUs per tahun.



Upaya yang telah dilakukan BP Batam adalah membangun dermaga di sisi utara sepanjang 650 meter dengan investasi sebesar Rp600 miliar. Namun keberadaan dermaga batu ampas tersebut belum mampu menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas pelabuhan mempertimbangkan keseluruhan sistem pengelolaan dan ketersediaan fasilitas pelabuhan yang belum memadai. Dengan segala keterbatasan tersebut dan persaingan operator pelabuhan yang semakin ketat, Batu Ampar perlu dikembangkan lebih modern baik dari sisi sistem pengelolaan dan fasilitas pelabuhan.

Batam Central LRT

PERTUMBUHAN KENDARAAN DI KOTA BATAM MULAI MEMICU KEMACETAN DI BEBERAPA RUAS JALAN DAN PENURUNAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT SUDAH SEHARUSNYA DIANTISIPASI DENGAN PENYEDIAAN SARANA TRANSPORTASI PUBLIK YANG MODERN DAN MURAH

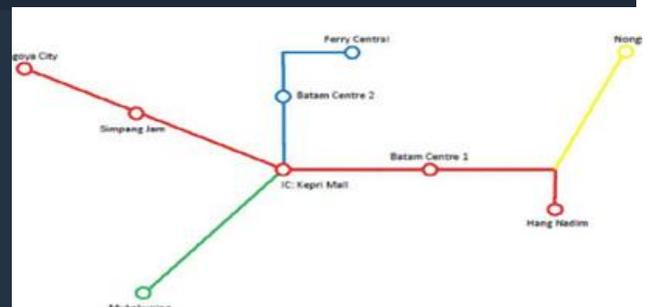
Proyek Batam Light Rail Transit (LRT) ini disamping mampu menjawab kebutuhan sarana transportasi publik yang murah dan efisien, juga men dorong pengelolaan sarana transportasi umum yang lebih baik dengan harga bersaing dan pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor LRT. Proyek ini akan menghubungkan koridor utama di Pulau Batam meliputi kawasan-kawasan pertumbuhan penting seperti pariwisata, industri.

Integrasi pengembangan LRT akan disinergikan dengan proyek pembangunan kawasan residensial dan komersial, memodernisasi angkutan feeder, dan memudahkan arus perpindahan orang dari satu koridor ke koridor lainnya.

LRT RUTE MAP



LRT RUTE Design





KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Direktorat Pembinaan
Peran Serta Masyarakat



Bimbingan Teknis Antikorupsi

UDKAN TATA KELOLA PEMERIN

BERINTEGRITAS DENGAN P

ERTA MASYARAK

20
22

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu misi yang dilakukan untuk mencapai visi pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Tata Kelola Pemerintahan yang baik juga merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's atau tata Kelola berkelanjutan khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah. Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 secara konsisten menunjukkan peningkatan. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 67,98 menjadi pada tahun 2020 adalah sebesar 68,57.

Selain itu, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan nilai 75,63 yang meningkat dari 75,28 pada tahun 2019. Hasil penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dari tahun 2017 sampai dengan 2020 Provinsi Kepulauan Riau berhasil mendapatkan predikat WTP. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan perlu untuk dipertahankan.





*Gurindam
Dua Belas*



Gurindam Pasal 1

Ini gurindam pasal yang pertama
Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan
nama.

Barang siapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang ma'rifat
Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang
bahari.

Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang terpedaya.
Barang siapa mengenal akhirat,
tahulah ia dunia mudarat.

Gurindam Pasal 2

Ini gurindam pasal yang kedua
Barang siapa mengenal yang
tersebut,
tahulah ia makna takut.

Barang siapa meninggalkan
sembahyang,
seperti rumah tiada bertiang.

Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua temasya.

Barang siapa meninggalkan zakat,
tiadalah hartanya beroleh berkat.

Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.

Gurindam Pasal 3

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.

Apabila terpelihara kuping,
khabar yang jahat tiadalah damping.

Apabila terpelihara lidah,
nescaya dapat daripadanya faedah.

Bersungguh-sungguh engkau
memeliharakan tangan,
daripada segala berat dan ringan.

Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi'il yang tiada senonoh.

Anggota tengah hendaklah ingat,
di situlah banyak orang yang hilang
semangat

Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjalan yang membawa rugi.

Gurindam Pasal 4

Hati kerajaan di dalam tubuh,
jikalau zalim segala anggota pun roboh.

Apabila dengki sudah bertanah,
datanglah daripadanya beberapa anak panah.

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang yang tergelincir.

Pekerjaan marah jangan dibela,
nanti hilang akal di kepala.

Jika sedikitpun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

Tanda orang yang amat celaka,
aib dirinya tiada ia sangka.

Bakhil jangan diberi singgah,
itupun perampok yang amat gagah.

Barang siapa yang sudah besar,
janganlah kelakuannya membuat kasar.

Barang siapa perkataan kotor,
mulutnya itu umpama ketur.

Di mana tahu salah diri,
jika tidak orang lain yang berperni.

Gurindam Pasal 5

Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa,
Jika hendak mengenal orang yang
berbahagia,
sangat memeliharakan yang sia-sia.
Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.
Jika hendak mengenal orang yang berilmu,
bertanya dan belajar tiadalah jemu.
Jika hendak mengenal orang yang berakal,
di dalam dunia mengambil bekal.
Jika hendak mengenal orang yang baik
perangai,
lihat pada ketika bercampur dengan orang
ramai.

Gurindam Pasal 6

Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.
Cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan tiap seteru.
Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh menyerahkan diri.
Cahari olehmu akan kawan,
pilih segala orang yang setiawan.
Cahari olehmu akan abdi,
yang ada baik sedikit budi,

Gurindam Pasal 7

Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuk dusta.
Apabila banyak berlebih-lebihan suka,
itulah tanda hampir duka.
Apabila kita kurang siasat,
itulah tanda pekerjaan hendak sesat.
Apabila anak tidak dilatih,
jika besar bapanya letih.
Apabila banyak mencela orang,
itulah tanda dirinya kurang.
Apabila orang yang banyak tidur,
sia-sia sahalalah umur.
Apabila mendengar akan khabar,
menerima itu hendaklah sabar.
Apabila menengar akan aduan,
membicarakannya itu hendaklah cemburuan.
Apabila perkataan yang lemah-lembut,
lekaslah segala orang mengikut.
Apabila perkataan yang amat kasar,
lekaslah orang sekalian gusar.
Apabila pekerjaan yang amat benar,
tidak boleh orang berbuat onar.

Gurindam Pasal 8

Barang siapa khianat akan dirinya,
apalagi kepada lainnya.
Kepada dirinya ia aniaya,
orang itu jangan engkau percaya.
Lidah yang suka membenarkan dirinya,
daripada yang lain dapat kesalahannya.
Daripada memuji diri hendaklah sabar,
biar pada orang datangnya khabar.
Orang yang suka menampakkan jasa,
setengah daripada syirik mengaku kuasa.
Kejahatan diri sembunyikan,
kebaikan diri diamkan.
Keaiban orang jangan dibuka,
keaiban diri hendaklah sangka.

Gurindam Pasal 9

Tahu pekerjaan tak baik,
tetapi dikerjakan,
bukannya manusia yaitulah syaitan.
Kejahatan seorang perempuan tua,
itulah iblis punya penggawa.
Kepada segaia hamba-hamba raja,
di situlah syaitan tempatnya manja.
Kebanyakan orang yang muda-muda,
di situlah syaitan tempat berkuda.
Perkumpulan laki-laki dengan
perempuan,
di situlah syaitan punya jamuan.
Adapun orang tua yang hemat,
syaitan tak suka membuat sahabat
Jika orang muda kuat berguru,
dengan syaitan jadi berseteru.

Gurindam Pasal 10

Dengan bapak jangan durhaka
supaya Allah tidak murka.
Dengan ibu hendaklah hormat
supaya badan dapat selamat.
Dengan anak janganlah lalai
supaya dapat naik ke tengah balai.
Dengan istri dan gundik janganlah alpa
supaya kemaluan jangan menerpa.
Dengan kawan hendaklah adil
supaya tangannya jadi kapil.

Gurindam Pasal 11

Hendaklah berjasa,
kepada yang sebangsa.
Hendaklah jadi kepala,
buang perangai yang cela.
Hendaklah memegang amanat,
buanglah khianat.
Hendak marah,
dahulukan hujjah.
Hendak dimalui,
jangan memalui.
Hendak ramai,
murahkan perangai.

Gurindam Pasal 12

Gurindam Dua Belas, pasal yang ke 11 dan ke 12
Raja mufakat dengan menteri,
seperti kebun berpagarkan duri.
Betul hati kepada raja,
tanda jadi sebarang kerja.
Hukum adil atas rakyat,
tanda raja beroleh inayat.
Kasihkan orang yang berilmu,
tanda rahmat atas dirimu.
Hormat akan orang yang pandai,
tanda mengenal kasa dan cindai.
Ingatkan dirinya mati,
itulah asal berbuat bakti.
Akhirat itu terlalu nyata,